

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FREKUENSI
RAPAT KOMITE AUDIT PADA PERUSAHAAN NON
KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2014**

**HEDYAN SABILA GH AISANI
8335123521**



**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2016**

***DETERMINANTS OF AUDIT COMMITTEE MEETING
FREQUENCY ON NON FINANCIAL COMPANIES LISTED IN
INDONESIAN STOCK EXCHANGE 2014***

HEDYAN SABILA GH AISANI

8335123521



Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment

**STUDY PROGRAM OF S1 ACCOUNTING
DEPARTMENT OF ACCOUNTING
FACULTY OF ECONOMICS
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2016**

ABSTRAK

HEDYAN SABILA GH AISANI. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Frekuensi Rapat Komite Audit. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2016

Pembimbing: (1) Dr. Etty Gurendrawati, S.E., Akt., M.Si. (2) Yunika Murdayanti, S.E.,M.Si., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Variabel dependen berupa frekuensi rapat komite audit diukur menggunakan jumlah rapat komite audit selama satu tahun. Sementara itu untuk variabel independen berupa konsentrasi kepemilikan diukur dengan menggunakan persentase saham terbesar, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan diukur menggunakan persentase saham yang dimiliki direksi dan komisaris, ukuran dewan komisaris diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen diukur menggunakan jumlah komisaris independen per jumlah dewan komisaris. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini dengan populasi perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014. Purposive sampling digunakan sehingga data yang didapatkan peneliti sebanyak 228 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan software Eviews 9.

Hasil uji statistik menunjukkan konsentrasi kepemilikan memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 dan memiliki koefisien regresi positif, kepemilikan oleh pihak internal memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 dan memiliki koefisien regresi positif, ukuran dewan komisaris memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 dan memiliki nilai koefisien regresi positif, dan proporsi komisaris independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 dan memiliki nilai koefisien regresi negatif.

Hasil analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap frekuensi rapat komite audit. Sementara itu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi rapat komite audit.

Kata kunci: Konsentrasi Kepemilikan, Kepemilikan Oleh Pihak Internal Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Frekuensi Rapat Komite Audit.

ABSTRACT

HEDYAN SABILA GHASANI. *Determinants of Audit Committee Meeting Frequency. Skripsi. Departement Of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Negeri Jakarta. 2016*

Supervisor: (1) Dr. ETTY GURENDRAWATI, S.E., Akt., M.Si. (2) YUNIKA MURDAYANTI, S.E., M.Si., M.Ak.

This research aims to analyze *determinants of audit committee meeting frequency. Audit committee meeting frequency is the dependent variable in this research were measured by number of meetings of the audit committee in the year 2014. Meanwhile for the independent variables using ownership concentration were measured by percentage of ordinary shares of the first owner, insider ownership were measured by percentage of ordinary shares owned by directors and commissioner, board size were measured by number of commissioner on the board, and board composition were measured by proportion of independent commissioner on the total number of commissioner. Secondary data used in this research with a population of non financial companies listed on the Stock Exchange in 2014. While the sampling method used was purposive sampling method which is overall 164 samples choose. This research uses multiple regression method to test the hypothesis with Eviews 9 computer program.*

Statistical analysis showed ownership concentration has a significance value above 0,05 and has a positive regression coefficient. Insider ownership has a significance value above 0,05 and has a positive regression coefficient. Board size has a significance value below 0,05 and has a positive regression coefficient, and board composition has a significance value above 0,05 and has a negative regression coefficient.

The result of this research can be concluded that the board size has significant influence on audit committee meeting frequency. Meanwhile ownership concentration, insider ownership, and board composition has no significant influence on.audit committee meeting frequency.

Keyword: *Ownership Concentration, Insider Ownership, Board Sice, Board Composition, Audit Committee Meeting Frequency*

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

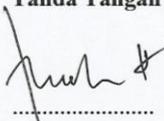
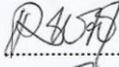
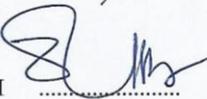
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana E. S., M. Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak.</u> NIP. 19770617 200812 2 001	Ketua Penguji		5 JAN 2017
<u>Petrolis Nusa Perdana, M.Ak.</u> NIP. 19800320 201404 1 000	Sekretaris		28 DES 2016
<u>Dr. Rida Prihatni, SE., Akt., M.Si.</u> NIP. 19760425 200112 2 002	Penguji Ahli		28 DES 2016
<u>Dr. ETTY Gurendrawati, SE., Akt., M.Si.</u> NIP. 19680314 199203 2 002	Pembimbing I		5 JAN 2017
<u>Yunika Murdayanti, SE., M.Si., M.Ak.</u> NIP. 19780621 200801 2 011	Pembimbing II		5 JAN 2017

Tanggal Lulus: 22 November 2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta

Jakarta, November 2016



Hedyan Sabila Ghaisani
No. Reg. 8335123521

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Frekuensi Rapat Komite Audit.”

Proposal penelitian ini disusun sebagai persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Selama proses penelitian dan penyusunan penelitian ini, peneliti mendapat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan karunia, nikmat, dan pertolongan-Nya disaat susah maupun senang sehingga peneliti bisa menyelesaikan proposal penelitian ini;
2. Kedua orang tua, Ibu Letkol Cku (K) Nurmala dan Bapak Harjanto, serta keluarga besar yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materil;
3. Bapak Dr. Dedi Purwana, M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
4. Ibu Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
5. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, S.E., Akt., M.Si., selaku dosen pembimbing satu;

6. Ibu Yunika Murdayanti, S.E., M.Si., M.Ak., selaku dosen pembimbing dua;
7. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama peneliti duduk di bangku perkuliahan;
8. Teman-teman seperjuangan, Ake, Fany, AKB12, dan Akuntansi 2012 yang telah memberikan motivasi dalam proses penelitian dan penyusunan penelitian.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif.

Jakarta, November 2016

Hedyan Sabila Ghaisani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Pembatasan Masalah	14
D. Perumusan Masalah	14
E. Kegunaan Penelitian	15
BAB II.....	17
KAJIAN TEORITIK.....	17
A. Deskripsi Konseptual.....	17
1. Teori Agensi.....	17
2. Good Corporate Governance.....	20
3. Komite Audit	22

4. Frekuensi Rapat Komite Audit.....	28
5. Konsentrasi Kepemilikan.....	31
6. Kepemilikan oleh Pihak Internal Perusahaan (<i>Insider Ownership</i>).....	32
7. Ukuran Dewan Komisaris.....	33
8. Proporsi Komisaris Independen.....	34
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	37
C. Kerangka Teoritik.....	42
D. Perumusan Hipotesis.....	45
BAB III.....	51
METODOLOGI PENELITIAN.....	51
A. Tujuan Penelitian.....	51
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	51
C. Metode Penelitian.....	52
D. Populasi dan Sampel.....	53
E. Operasional Variabel Penelitian.....	53
1. Variabel Dependen.....	54
2. Variabel Independen.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	58
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	59
2. Uji Asumsi Klasik.....	59
3. Analisis Regresi Berganda.....	63
4. Uji Hipotesis.....	64
BAB IV.....	68
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Deskripsi Data.....	68
1. Hasil Pemilihan Sampel.....	68
2. Analisis Statistik Deskriptif.....	69

B. Pengujian Hipotesis.....	75
1. Uji Asumsi Klasik	76
2. Analisis Regresi Linier Berganda	80
3. Uji Hipotesis	82
C. Pembahasan	88
1. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Frekuensi Rapat Komite Audit	88
2. Pengaruh Kepemilikan Oleh Pihak Internal Perusahaan Terhadap Frekuensi Rapat Komite Audit	91
3. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Frekuensi Rapat Komite Audit	93
4. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Frekuensi Rapat Komite Audit.....	95
BAB V	98
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	98
A. Kesimpulan	98
B. Implikasi	99
C. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	134

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel	69
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	70
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Uji Multikolinearitas	78
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Uji Heteroskedastisitas	79
Tabel 4.5 Hasil Analisis regresi Linier Berganda	80
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Uji t.....	83
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	86
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F.....	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Teoritik	45
Gambar 4.1 Hasil Pengujian Uji Normalitas.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kartu Konsultasi	104
Lampiran 2 Perusahaan Sampel Penelitian	105
Lampiran 3 Ringkasan Perhitungan Variabel Independen dan Variabel Dependen	111
Lampiran 4 Hasil Perhitungan Proporsi Komisaris Independen.....	117
Lampiran 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif dengan Eviews 9	123
Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas dengan Eviews 9.....	124
Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinearitas dengan Eviews 9.....	125
Lampiran 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Eviews 9	126
Lampiran 9 Hasil Pengujian Uji t dengan Eviews 9	127
Lampiran 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) dan Uji F dengan Eviews 9	128
Lampiran 11 Hasil Data yang Tidak Lengkap	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini keberadaan komite audit telah menjadi bagian dari *Good Corporate Governance* (GCG). Keberadaan komite audit telah diwajibkan kepada perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Dikarenakan adanya kasus perusahaan besar seperti PT Bank Lippo Tbk., PT Waskita Karya (Persero), dan PT Kimia Farma Tbk. yang mengalami kebangkrutan akibat kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah. Selain itu, adanya konsentrasi kepemilikan perusahaan pada pemegang saham (keluarga) yang menyebabkan campur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen menjadi lebih besar sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mengurangi konflik di antara pemegang saham dan manajemen, menurut Mendez dan Gracia (2007) diperlukan adanya tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu mekanisme dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan adanya pengawasan atau *monitoring*. GCG muncul sebagai suatu standar bagi perusahaan untuk dapat melindungi para pemegang sahamnya. Salah satu komponen penting GCG adalah dewan komisaris. Dewan komisaris bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan dan mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Dewan komisaris membentuk komite-komite yang

salah satunya adalah komite audit yang digunakan dalam mengawasi perusahaan. Dewan komisaris bersama alat bantuannya, komite audit, berperan penting dalam mengawasi perusahaan untuk kepentingan para investor (Restria & Cahyonowati, 2014).

Sebagai bahan pembelajaran dari kasus tersebut, maka pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memiliki komite audit. Kewajiban perusahaan publik di Indonesia untuk memiliki komite audit diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Selain itu, kewajiban perusahaan untuk memiliki komite audit juga diatur dalam Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit dan KEP-339/Bej/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit.

Kasus PT Telkomsel tahun 2011, yang bermula dari General Manager Special Audit PT Telkomsel, HM Sukarni, mengajukan surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Isi surat tersebut adalah meminta Presiden untuk mengevaluasi dan menginvestigasi sejumlah kasus yang diklaim terjadi di lingkup internal induk dan anak perusahaan tersebut, antara lain proyek renovasi gedung, proyek swap BTS Telkomsel, dan pengadaan SIM Card RF untuk Telkomsel Cash. Sebelum mengirimkan surat terbuka tersebut, *whistleblower* telah meminta agar komite audit melakukan evaluasi dan investigasi atas kasus-kasus

yang terjadi. Namun, ternyata permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh komite audit.

Pada kasus yang terjadi di PT Telkomsel, tampak bahwa komite audit tidak berjalan secara efektif. Karena menurut PwC (2010), *Audit Committee Effectiveness: What Works Best*, 4th Edition, dinyatakan bahwa komite audit dapat menjaga perusahaan dari timbulnya *fraud* dan tindakan ilegal lainnya dengan cara memastikan bahwa perusahaan menerapkan program kepatuhan yang memadai. Seharusnya komite audit harus segera memproses informasi pengaduan yang masuk untuk menentukan apakah investigasi perlu dilakukan. Dalam kasus yang terjadi, PT Telkomsel telah melaksanakan sejumlah rapat pada tahun 2011 sebanyak 30 kali. Walaupun demikian, perusahaan tersebut tetap dapat melakukan kecurangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme komite audit seperti penentuan tim investigasi, kepada siapa laporan investigasi ditujukan, memonitor proses investigasi yang seharusnya dibahas dalam rapat komite audit belum berjalan dengan semestinya. Apabila mekanisme yang seharusnya dilaksanakan, maka terjadinya kecurangan dan korupsi dapat dicegah.

Menurut Peraturan Nomor: IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit memiliki peran penting untuk mengawasi dan memantau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan audit eksternal. Mengingat pentingnya keberadaan Komite Audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan,

terutama dari aspek pengendalian, maka Komite Audit perlu mendapatkan perhatian dari manajemen dan Dewan Komisaris serta pihak-pihak terkait yang bertindak sebagai regulator seperti Menteri keuangan, Menteri BUMN, Bapepam, Bursa Efek Jakarta & Bursa Efek Surabaya. Dengan ketentuan BAPEPAM ini terjadinya potensi kecurangan (*fraud*) dapat dicegah dan dihindari dengan memaksimalkan fungsi pengawasan komite audit yang ada dalam internal perusahaan.

Sebagai wujud pengawasannya, komite audit harus melakukan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan dan hanya dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dalam rapat dan disampaikan kepada dewan komisaris. Disamping itu juga komite audit wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. Komite audit wajib membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan di dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan juga wajib menyampaikan kepada Bapepam-LK terkait tentang informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian komite audit di dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentiannya. Informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian wajib dimuat dalam *website* bursa dan/atau *website* perusahaan sebagai dari keterbukaan informasinya kepada publik atau masyarakat. Melalui ketentuan ini jelas bahwa maksud dari ketentuan

ini bahwa hasil-hasil temuan komite audit tidak berhenti kepada emiten saja, tetapi lebih dari itu setelah produk temuan komite audit didapatkan, maka tetap harus didiskusikan di dalam rapat-rapat internal anggotanya untuk mencari jalan keluarnya. Sehingga hal ini tidak sebatas laporan-laporan yang tidak ada implikasi positif di dalam rangka perbaikan dan perubahan perusahaan ke depannya, terutama kondisi keuangannya. Regulator percaya dan teori keagenan menjelaskan dan memperkirakan, bahwa lebih sering rapat komite audit menunjukkan ketekunan komite audit dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif sehingga masalah keagenan diminimalkan (Raghundanan dan Rama, 2007).

Blue Ribbon Committee (dalam Bryan *et al.* 2004) menyebutkan karakteristik penting yang harus dimiliki komite audit adalah frekuensi pertemuan, keahlian di bidang keuangan, dan komitmen waktu. Ketiga faktor tersebut merupakan kunci penentu efektivitas komite audit. Komite audit yang efektif juga dapat membantu meningkatkan transparansi di pasar sekuritas, menghasilkan perlindungan yang lebih baik dari pemegang saham dan peningkatan nilai perusahaan (McMullen dan Raghunandan, 1996; Pwc, 1999; DeZoort *et al.*, 2002 dalam Yin *et al.*, 2012). Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab, komite audit dapat mengadakan rapat secara periodik sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri. Rapat komite audit merupakan sarana untuk mendiskusikan masalah yang signifikan yang telah dibahas sebelumnya dengan manajemen dan untuk survei akurasi pelaporan keuangan (Gantjowati & Nugraheni, 2014). Oleh karena itu, frekuensi rapat komite audit dapat menunjukkan tingkat kerajinan

anggota komite audit dalam melakukan pengawasan perusahaan (Raghunandan & Rama, 2007).

Keberhasilan komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dipengaruhi oleh berbagai keragaman sumber daya anggota komite audit. Keragaman tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti latar belakang pendidikan, kompetensi, pengalaman dalam bisnis dan industri, karir dan pengalaman kerja. Selain itu, kinerja komite audit juga tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh anggota komite audit yaitu jumlah rapat yang dilakukan oleh anggota komite audit dalam setiap tahun serta komitmen waktu yang dimiliki oleh anggota komite audit tersebut (Rustiarini & Sugiarti, 2013). Jumlah rapat komite audit juga dianjurkan dalam tata kelola perusahaan sehingga dapat digunakan untuk menilai efektivitas komite audit. Berdasarkan penelitian McMullen dan Raghunandan, 1996 (dalam Rahmat *et al.* 2009) perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan jarang melakukan pertemuan komite audit seintensif perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Dengan pertemuan yang rutin dan terkontrol akan membantu komite audit untuk memeriksa akuntansi, sistem pengendalian internal manajemen, dan direktur eksekutif dapat memberikan penjelasan terkait isu-isu yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang sehingga dapat meminimalisasikan resiko akibat faktor internal maupun ancaman eksternal. *Blue Ribbon Committee*, 1999 (dalam Yin *et al.*, 2012), merekomendasikan minimal empat rapat setahun untuk komite audit menjadi efektif. KPMG, 1999 (dalam Yin *et al.*, 2012), mengusulkan antara tiga dan empat rapat dalam satu tahun, sedangkan PwC, 1993 (dalam Yin *et al.*, 2012),

merekomendasikan minimal empat rapat dalam setahun untuk komite audit menjadi efektif.

Dalam rapatnya, komite audit dapat meninjau akurasi pelaporan keuangan atau dan mendiskusikan isu-isu signifikan yang telah dikomunikasikan dengan manajemen namun, menurut penilaian komite audit, mungkin memerlukan tindak lanjut. DeZoort et al. (2002) dalam Sutaryo (2010) menunjukkan bahwa frekuensi rapat yang lebih besar berhubungan dengan penurunan insiden masalah pelaporan keuangan dan peningkatan kualitas audit eksternal. Oleh karena itu rapat komite audit menjadi penting dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Namun demikian, regulasi yang ada tidak menyebutkan secara eksplisit jumlah frekuensi rapat komite audit dalam tiap periodenya sehingga tidak terdapat pedoman bagi komite audit terkait rapat yang harus dilakukan.

Latar belakang permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah teori agensi, menunjukkan bahwa asimetri informasi akan bertahan dalam situasi pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. Hal tersebut dapat menyebabkan konflik kepentingan karena *moral hazard* dan masalah *adverse selection* terkait dengan permasalahan ini. Perusahaan akan dikenakan biaya agensi dalam bentuk pengawasan untuk mengurangi konsekuensi yang merugikan dari asimetri informasi tersebut. Pengawasan tersebut yaitu dengan penggunaan rapat komite audit yang telah banyak disarankan oleh mekanisme *corporate governance* yang dapat meningkatkan auditing dan pelaporan kualitas perusahaan.

Efektivitas komite audit dapat dinilai dari aktivitas komite audit. Aktivitas komite audit salah satunya dapat dilihat dari frekuensi rapat komite audit. Frekuensi

rapat sering dianggap dalam penelitian terdahulu sebagai proksi untuk tingkat aktivitas pengawasan (Collier dan Gregory, 1999; Vafeas, 1999; Laksmana, 2008; Sharma et al., 2009 dalam Greco, 2011). Mengingat pentingnya efektivitas komite audit, maka banyak penelitian mencoba untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Penelitian Greco (2011) menganalisis faktor penentu frekuensi rapat komite audit, dimana dalam penelitian tersebut menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit di perusahaan Italia. Faktor-faktor tersebut meliputi konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan (*Insider Ownership*), ukuran dewan direksi, dualitas CEO, proporsi komisaris independen, dan keberadaan komisaris independen sebagai ketua. Pada penelitian Greco (2011) tersebut memasukkan variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, *leverage*, umur perusahaan, dan kinerja perusahaan pada periode sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Greco (2011) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, dualitas CEO, keberadaan komisaris independen sebagai ketua, *leverage*, kinerja perusahaan pada periode sebelumnya dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Sementara proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit.

Struktur kepemilikan dianggap sebagai penentu utama kegiatan komisaris (Greco, 2011). Dalam suatu kondisi yang digambarkan oleh konsentrasi kepemilikan pihak eksternal perusahaan, pemegang saham yang dominan mungkin saja mencari cara untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dan

mengambil alih kekayaan dari investor-investor lainnya (Shleifer dan Wolfenzon, 2012; Dyck dan Zingales, 2004 dalam Greco, 2011). Dalam situasi ini, konflik agensi terdapat antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa pengendalian kepemilikan saham mayoritas memiliki dampak negatif pada frekuensi rapat komite audit (Mendez dan Garcia, 2007 dalam Greco, 2011). Akan tetapi, penelitian Greco (2011) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit.

Teori agensi berpendapat bahwa kepemilikan oleh manajemen adalah dua sisi yang mempengaruhi biaya agen (Jensen dan Meckling, 1976; Shleifer dan Vishny, 1997). Ada dua pengaruh kepemilikan oleh pihak internal perusahaan. Pertama, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat menyelaraskan manajemen dan kepentingan pemegang saham. Kedua, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat mengurangi biaya agensi. Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat diartikan sebagai pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat menggantikan mekanisme pengawasan lainnya (Leftwich et al., 1981; Fama dan Jensen, 1983 dalam Greco, 2011). Namun demikian, penelitian yang lain menemukan bahwa kepemilikan oleh pihak internal perusahaan berdampak negatif pada frekuensi rapat komite audit (Mendez dan Garcia, 2007 dalam Greco, 2011). Hal ini terjadi karena kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat memberikan pengawasan langsung ke akses informasi perusahaan.

Faktor penting lainnya yang dianggap mempengaruhi aktivitas komite audit adalah ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan yang lebih besar memberikan akses ke sumber daya yang lebih besar dan bakat manajerial yang lebih tinggi, sehingga memberikan pengawasan yang lebih efektif. Penelitian Adelopo et al. (2012), menunjukkan hubungan positif antara ukuran dewan dengan aktivitas komite audit meskipun tidak signifikan. Akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Greco (2011) dan Yin et al. (2012) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit.

Salah satu faktor yang dianggap dapat berpengaruh terhadap peran komite audit adalah proporsi komisaris independen. Proporsi komisaris independen yang duduk di dalam dewan komisaris dianggap secara proporsional menentukan tingkat independensi dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris yang independen dianggap akan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas komite audit karena anggota komite audit dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Proporsi komisaris independen pada dewan komisaris berkontribusi untuk meningkatkan pengawasan perusahaan (Carcello et al., 2002 dalam Greco, 2011). Vafeas, 1999 (dalam Greco, 2011) berpendapat bahwa komisaris independen cenderung menuntut rapat dewan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mengawasi manajemen. Komisaris independen dapat menuntut pengawasan internal yang lebih besar atas proses pelaporan keuangan untuk melindungi reputasi mereka. Oleh sebab itu, tuntutan ini yang mengakibatkan rapat komite audit lebih sering diadakan dalam perusahaan. Namun demikian, penelitian Yin et al. (2012)

menemukan bahwa proporsi komisaris independen berhubungan negatif dengan frekuensi rapat komite audit.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat *research gap* yaitu adanya perbedaan hasil penelitian pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian Yin et al. (2012) menemukan bahwa proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas, proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, proporsi komisaris yang memiliki kompetensi, *leverage*, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap frekuensi rapat komite audit, sedangkan ukuran perusahaan dan komite audit berhubungan positif dengan frekuensi rapat komite audit. Penelitian Adelopo et al. (2012) menemukan bahwa proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap aktivitas komite audit. Namun, jumlah dewan komisaris, kehadiran ahli keuangan di komite audit, jumlah komisaris independen dalam komite audit, dan piagam komite audit tidak berpengaruh terhadap aktivitas komite audit.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Restria dan Cahyonowati (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Restria dan Cahyonowati (2014) adalah pada penelitian tersebut menguji faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pengawasan dewan komisaris. Aktivitas pengawasan dewan komisaris diproksikan dengan frekuensi rapat dewan komisaris. Pengukuran variabel aktivitas pengawasan dewan komisaris adalah jumlah frekuensi rapat dewan komisaris pada periode tahun 2011 (Restria dan Cahyonowati, 2014). Berdasarkan *research gap* tersebut, maka dilakukan penelitian kembali untuk menemukan bukti empiris

adanya pengaruh faktor-faktor yang menentukan frekuensi rapat komite audit karena hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya masih beragam.

Penelitian ini mengacu pada penelitian serupa yang dilakukan oleh Greco (2011) dalam lingkup perusahaan di Italia. Variabel dependen pada penelitian Greco (2011) adalah frekuensi rapat dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit. Penelitian tersebut menggunakan variabel struktur kepemilikan yang terdiri atas konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan oleh pihak internal perusahaan (*Insider Ownership*). Variabel independen lainnya meliputi ukuran dewan direksi, dualitas CEO, proporsi komisaris independen, dan keberadaan komisaris independen sebagai ketua. Terdapat juga variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, leverage, umur perusahaan dan kinerja perusahaan pada periode sebelumnya. Pada penelitian Greco (2011) tersebut, perusahaan perbankan tidak termasuk ke dalam sampel penelitian karena memiliki struktur *Good Corporate Governance* (GCG) yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Greco (2011) adalah penelitian ini hanya menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen terhadap frekuensi rapat komite audit. Karena ruang lingkup aktivitas pengawasan komite audit lebih spesifik kepada laporan keuangan dan pengendalian internal. Selain itu, dewan direksi pada penelitian Greco (2011) digantikan dengan dewan komisaris pada penelitian ini. Karena kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*twotier board system*) dimana dewan komisaris tidak dapat bertindak selaku dewan direksi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Untuk itu dibutuhkan kembali bukti empiris terkait dengan perbedaan pendapat pada penelitian terdahulu. Berdasarkan *research gap* tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Frekuensi Rapat Komite Audit”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit, yaitu sebagai berikut:

1. Konsentrasi kepemilikan yang lebih besar akan menyebabkan berkurangnya frekuensi rapat komite audit, karena pemegang saham mempunyai andil yang lebih besar dalam pengawasan
2. Perbedaan informasi asimetris antara pemegang saham internal dengan pemegang saham orang luar minoritas karena pemegang saham internal secara langsung turut dalam pengawasan perusahaan sehingga memungkinkan menurunnya jumlah frekuensi rapat komite audit
3. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar memberikan akses ke sumber daya yang lebih besar dan bakat manajerial yang lebih tinggi, sehingga dapat menggantikan pengawasan lainnya yang mengakibatkan menurunnya frekuensi rapat komite audit

4. Tidak adanya regulasi yang menyebutkan secara eksplisit frekuensi rapat komite audit dalam tiap periodenya, akan tetapi jumlah rapat komite audit dianjurkan dalam tata kelola perusahaan

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, terlihat beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan penelitian frekuensi rapat komite audit. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh yang ditimbulkan dari konsentrasi kepemilikan, kepemilikan pihak internal perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen terhadap frekuensi rapat komite audit. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) khususnya yang menerbitkan laporan tahunan tahun 2014.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit?
2. Apakah kepemilikan oleh pihak internal perusahaan (*Insider Ownership*) berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit?

4. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan referensi untuk mengetahui apa saja variabel-variabel terkait dengan yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI);
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya dan manfaat dari frekuensi rapat komite audit bagi perusahaan, yang diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Kegunaan praktis bagi peneliti adalah sebagai bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit;
 - b. Kegunaan bagi perusahaan adalah sebagai informasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melaksanakan rapat komite audit dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia, sehingga dapat memenuhi pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik;

- c. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi agar dalam berinvestasi para *stakeholders* memilih perusahaan yang transparan dengan tingkat pengawasan pada proses laporan keuangan yang baik.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan mengenai teori keagenan (*agency theory*), yang menjadi dasar untuk menjelaskan fenomena penelitian. Dalam bagian ini juga akan dibahas *Corporate Governance* sebagai mekanisme untuk mengurangi masalah agensi khususnya mengenai peran komite audit dan struktur kepemilikan. Selain itu juga akan dibahas mengenai penelitian terdahulu.

1. Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dengan prinsipal. Prinsipal merupakan pihak yang memberi wewenang, sedangkan agen merupakan pihak yang menerima wewenang dalam bentuk kontrak kerja sama. Pihak agen membuat kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal, sementara pihak prinsipal membuat kontrak untuk memberi imbalan pada pihak agen (Hendriksen dan Van Breda, 2001). Di dalam perusahaan, pihak prinsipal dianalogikan sebagai pemilik atau pemegang saham dan pihak agen adalah sebagai manajer perusahaan.

Dalam teori ini dijelaskan bahwa baik prinsipal maupun agen, masing-masing memiliki motif pribadi. Prinsipal mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agen. Tetapi agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan atau harapan prinsipal. Prinsipal mengharapkan *return*

yang maksimal, sedangkan agen juga memiliki keinginan untuk memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

Agency theory menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi antara agen dengan prinsipal. Dalam hubungan agensi antara prinsipal dengan agen, *agency theory* merujuk pada tiga unsur yang dapat mengekang perilaku menyimpang dari agen, yakni bekerjanya pasar tenaga kerja manajerial, bekerjanya pasar modal, dan bekerjanya pasar bagi keinginan menguasai dan memiliki atau mendominasi kepemilikan perusahaan (Sutedi, 2011). Unsur-unsur yang membantu terlaksananya *Good Corporate Governance* bersumber pada *agency theory*, yaitu pengelola perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, pemberi pinjaman, dan sebagainya.

Pihak manajemen yang seharusnya melakukan tindakan yang selaras dengan kepentingan pemegang saham, dalam hal tertentu dapat bertindak untuk kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan *agency problems*. *Agency problem* ini terjadi karena adanya informasi yang tidak lengkap atau biasa disebut sebagai asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan permasalahan yang terkait asimetri informasi antara lain:

- a. *Moral hazard*, yaitu permasalahan yang timbul apabila agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

- b. *Adverse selection*, yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan yang disebabkan oleh asimetri informasi, yaitu informasi yang tidak lengkap, keadaan dimana tidak semua informasi diketahui oleh kedua belah pihak.

Agency problem berdampak pada pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan. Masalah tersebut dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan antara agen dan prinsipal. Namun, dengan munculnya mekanisme pengawasan akan menimbulkan biaya yang disebut biaya agensi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), terdapat tiga jenis biaya agensi yaitu:

- a. Biaya pengawasan (*monitoring cost*) adalah biaya yang dikeluarkan karena melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas agen yang dilakukan oleh prinsipal.
- b. Biaya bonding (*bonding cost*) adalah biaya yang menjamin bahwa agen tidak akan bertindak sesuatu yang merugikan prinsipal.
- c. Biaya kerugian residual (*residual loss*) adalah pengurangan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal akibat perbedaan kepentingan dengan agen.

Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dewan komisaris bertindak sebagai pengendali internal tertinggi yang bertugas untuk mengawasi kegiatan manajemen. Dalam menjalankan tugas tersebut, dewan

komisaris membentuk komite audit untuk membantu tugasnya sebagai pengawas perusahaan. Komite audit merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan memantau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan audit eksternal. Komite audit berwenang dalam mengawasi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Dengan adanya komite audit, maka pengawasan terhadap manajemen akan meningkat sehingga diharapkan dapat mengatasi munculnya asimetri informasi.

2. Good Corporate Governance

Banyak perusahaan yang telah mengalami kegagalan karena tidak mengimplementasikan *Good Corporate Governance*. Saat ini pelaksanaan *Good Corporate Governance* menjadi perhatian khusus bagi perusahaan yang ingin menjaga kelangsungan usahanya.

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan (Amin, 2010).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal dan eksternal lainnya

sehubungan dengan hak dan tanggung jawab, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan.

Menurut KNKG (2006), prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* yaitu:

- a. Transparansi (*transparancy*), mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, diakses oleh pemangku kepentingan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*), mengandung unsur kejelasan fungsi, struktur, sistem, pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga perusahaan terlaksana secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
- d. Independensi (*independency*), artinya suatu keadaan dimana perusahaan terbebas dari pengaruh-pengaruh tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, dewan komisaris dan direksi terbebas dari tekanan dari pihak manapun termasuk pembuat peraturan.
- e. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya.

Mekanisme Corporate Governance dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu mekanisme internal dan eksternal (Lins dan Warnock, 2004). Mekanisme internal dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti RUPS, komposisi dewan direksi dan dewan komisaris, dan pertemuan dengan dewan direksi. Mekanisme eksternal seperti pemegang saham pihak eksternal, aturan hukum, dan pasar untuk mengendalikan perusahaan (Lins dan Warnock, 2004). Dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, maka salah satu mekanisme *Good Corporate Governance* yang dilakukan adalah dengan membentuk komite audit yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam mengawasi perusahaan. Komite audit termasuk dalam mekanisme internal *Corporate Governance*. Oleh karena itu, keberadaan komite audit sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik. Untuk dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan mengadakan rapat komite audit. Dengan adanya rapat komite audit dapat membantu mengawasi proses pelaporan keuangan. Pengawasan perusahaan tersebut termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian internal serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

3. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Dalam Mulyadi (2002) menjelaskan bahwa komite audit memiliki tugas untuk

menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan kepada pihak eksternal dan kepatuhan terhadap pihak eksternal.

Sedangkan menurut Arens (2010), komite audit terdiri dari tiga atau lima orang yang tidak terlibat dalam aktivitas dan pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan individu profesional yang bertujuan melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit antara lain: melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit, pengawasan independen atas pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen terhadap proses pelaksanaan *corporate governance*.

Forum for Corporate Governace in Indonesia (FCGI) mengemukakan bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh terhadap hal-hal berikut ini :

a. Laporan Keuangan

Komite audit melaksanakan pengawasan independen dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya.

b. Pengawasan Kontrol

Komite audit memberikan pengawasan independen atas masalah yang berpotensi mengandung risiko yang material.

c. Tata Kelola Perusahaan

Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *good corporate governance* sehingga perusahaan dapat menjalankannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Di Indonesia, keberadaan komite audit dalam perusahaan publik diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Keberadaan komite audit diwajibkan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*.

Menurut Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012, pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsi dewan komisaris.

Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) paling kurang memuat:

- a. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang
- b. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan
- c. Tata cara dan prosedur kerja
- d. Kebijakan penyelenggaraan rapat
- e. Sistem pelaporan kegiatan

- f. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan
- g. Masa tugas komite audit

Menurut Peraturan Nomor IX.I.5, dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan.

- h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan perusahaan.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

Selain itu komite audit juga mempunyai wewenang yang diatur dalam peraturan tersebut yaitu:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- d. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, komite audit pada umumnya memiliki akses langsung dengan setiap unsur pengendalian dalam perusahaan. Akan tetapi, tetap saja diperlukan suatu mekanisme komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak. Komunikasi yang dilakukan oleh komite audit yang berjalan lancar, akan menghasilkan kinerja pengendalian perusahaan meningkat. Pelaksanaan komunikasi tersebut tentu memerlukan instrumen. Dan karenanya informasi merupakan komponen yang sangat penting bagi komite audit dalam melaksanakan komunikasi. Komunikasi tersebut terlaksana dengan diadakannya rapat

komite audit. Komunikasi yang dilakukan oleh komite audit dengan berbagai pihak, dalam Effendi (2002) antara lain:

a. Komunikasi komite audit dengan dewan komisaris

Dalam rapat internal yang diselenggarakan secara rutin, komite audit melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala. Selain itu, laporan khusus juga dapat dibuat bila ditugaskan oleh komisaris.

b. Komunikasi komite audit dengan manajemen

Praktek yang baik membutuhkan partisipasi aktif dari manajemen dalam rapat komite. Laporan atas beberapa aktivitas manajemen yang krusial terhadap komite audit merupakan salah satu tanggung jawab pihak manajemen.

c. Komunikasi komite audit dengan internal auditor

Komunikasi internal auditor dengan komite audit diatur dalam Statement on Auditing Standard (SAS) No. 61. Dalam S AS ini, disebutkan beberapa jenis informasi yang perlu dilaporkan oleh auditor internal kepada komite audit.

d. Komunikasi komite audit dengan eksternal auditor

Kedudukan komite audit dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi perusahaan. Dalam SPAP Standar Auditing No. 380 diatur mengenai komunikasi antara Akuntan Publik (auditor eksternal) dengan

komite audit. Komunikasi dapat berbentuk lisan atau tertulis dimana berbagai informasi dapat dikomunikasikan diantara keduanya.

4. Frekuensi Rapat Komite Audit

Salah satu aktivitas rutin yang dilakukan komite audit dalam pelaksanaan tugasnya adalah melakukan pertemuan secara formal antar anggota komite audit, dewan komisaris, dewan direksi, maupun auditor eksternal (Rustiarini & Sugiarti, 2013). Dalam setiap *audit committee charter* yang dimiliki oleh masing-masing anggota, komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Pertemuan secara periodik ini sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit dapat mengadakan rapat secara periodik sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri. Menurut Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep 643/BL/2012, komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya (FCGI, 2002). Rapat komite audit hanya dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $1 / 2$ (satu per dua) jumlah anggota.

Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja.

Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada komisaris utama adalah:

- a. Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan.
- b. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit.
- c. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang

temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal.

Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, memonitor bahwa perusahaan patuh pada *code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau nonkeuangan perusahaan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undangundang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya (Putra, 2010).

Dalam penelitian ini variabel frekuensi rapat komite audit diproksikan dengan menggunakan jumlah rapat komite audit selama tahun 2014 (Greco, 2011; Yin *et. al.* 2012). Pengukurannya yaitu sebagai berikut:

Frekuensi Rapat Komite Audit

$$= \sum \text{Rapat Komite Audit tahun 2014}$$

5. Konsentrasi Kepemilikan

Konsentrasi kepemilikan merupakan kondisi dimana pemegang saham memiliki jumlah saham yang besar dan total persentase saham yang dimiliki para pemegang saham dari saham perusahaan. Kepemilikan perusahaan akan terkonsentrasi apabila saham yang dimiliki seorang investor semakin besar. Dengan saham mayoritas yang dimiliki oleh investor, semakin besar pula insentif pemilik perusahaan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan - tindakan manajerial. Aktivitas pengawasan biasanya dilakukan oleh dewan komisaris, dimana dewan komisaris dipilih oleh pemegang saham mayoritas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bertugas untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dengan mengawasi manajerial (Restria & Cahyonowati, 2014).

Keberadaan pemegang saham mayoritas menjadi cara yang efektif untuk meredakan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Yin et al., 2012). Pemegang saham mayoritas berharap komite audit untuk dapat berperan aktif sebagai pengawas. Akibatnya komite audit akan semakin meningkatkan aktivitasnya yaitu dengan mengadakan rapat komite audit. Pemegang saham mayoritas akan bertindak untuk kepentingan pribadi sehingga bisa merugikan pemegang saham minoritas.

Greco (2011); Yin *et. al.* (2012); (Restria & Cahyonowati, 2014) mengukur proksi konsentrasi kepemilikan dengan menggunakan persentase dari saham biasa oleh pemilik saham terbesar.

$$\text{Konsentrasi Kepemilikan} = \% \text{ Saham Terbesar}$$

6. Kepemilikan oleh Pihak Internal Perusahaan (*Insider Ownership*)

Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajerial perusahaan. Kepemilikan ini merupakan konsekuensi adanya kompensasi kepemilikan saham yang diberikan oleh perusahaan untuk manajemen.

Kepemilikan perusahaan oleh manajer merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipertimbangkan dalam perusahaan. Kepemilikan oleh manajer akan mempengaruhi kinerja manajemen, sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan.

Kepemilikan oleh manajemen dapat mengurangi biaya agensi karena hal tersebut dapat memotivasi manajemen untuk bertindak seperti pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Greco (2011), kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham serta dapat mengurangi biaya agensi. Oleh sebab itu, kepemilikan ini dapat menggantikan mekanisme pengawasan lainnya.

Pengukuran kepemilikan oleh pihak internal (*insider ownership*) menggunakan proksi persentase saham biasa yang dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi (Greco, 2011; (Restria & Cahyonowati, 2014). Perhitungannya yaitu sebagai berikut:

Kepemilikan Oleh Pihak Internal

= % Saham yang Dimiliki Direksi dan Komisaris

7. Ukuran Dewan Komisaris

Karakteristik komisaris dan CEO mungkin sebagai penentu rapat komisaris. Salah satu faktor penting yang dianggap mempengaruhi aktivitas komisaris adalah ukuran dewan komisaris (Greco, 2011). Ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006).

Ukuran dewan memungkinkan untuk mempengaruhi frekuensi rapat komite audit (Raghunandan dan Rama, 2007). Ukuran dewan yang lebih besar memberikan akses ke sumber daya yang lebih besar dan bakat manajerial yang lebih tinggi, sehingga memberikan pemantauan yang lebih efektif. Sebaliknya, ukuran yang lebih besar kemungkinan adalah bentuk tata kelola perusahaan yang tidak efisien, sehingga menyebabkan frekuensi rapat komite audit akan lebih sering (Vafeas, 1999).

Menurut Greco (2011); Yin et.al. (2012); Restrian & Cahyonowati (2014) pengukuran ukuran dewan komisaris menggunakan proksi dengan menghitung jumlahnya. Untuk perhitungannya sebagai berikut:

$$Ukuran\ Dewan\ Komisaris = \sum Dewan\ Komisaris$$

8. Proporsi Komisaris Independen

Dalam kaitan terciptanya perusahaan dengan penerapan GCG, maka dianggap perlu adanya komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Oleh karena itu adanya komisaris independen di suatu perusahaan adalah merupakan suatu persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh perusahaan tercatat di bursa efek untuk menciptakan tata kelola yang baik di dalam perusahaan.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan karyawan atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris independen tidak mewakili pemegang saham minoritas, tetapi keberadaannya dapat melindungi pemegang saham minoritas. Literatur akademis secara luas mengakui bahwa proporsi komisaris independen pada dewan berkontribusi untuk meningkatkan pemantauan dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau perundang-undangan (Carcello et al., 2002 dalam Greco, 2011).

Persyaratan mengenai komisaris independen diatur dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 dan peraturan BEI yaitu Peraturan

Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 menyatakan bahwa Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emitmen atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham (baik langsung maupun tidak langsung) pada emitmen atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emitmen atau perusahaan publik dan tidak memiliki hubungan usaha (baik langsung maupun tidak langsung) yang berkaitan dengan kegiatan usaha emitmen atau perusahaan publik. Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep 00001/BEI/01-2014, calon perusahaan tercatat yang akan mencatatkan saham di Papan Utama maupun di Papan Pengembangan wajib memiliki komisaris independen berjumlah paling kurang 30% dari jajaran anggota dewan komisaris.

Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012, komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.

- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama perusahaan.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Adanya kewenangan komisaris independen untuk membawahi komite audit, membuat tanggung jawab seorang komisaris independen yang menjadi ketua komite audit menjadi lebih besar dari anggota komisaris lainnya. Hal ini disebabkan karena tugas dan tanggung jawab komite audit adalah untuk mengawasi jalannya proses pembuatan laporan keuangan, dan dalam melakukan tugasnya penting bagi komite audit untuk memberikan penilaian manajemen atau untuk mengambil posisi yang mungkin bertentangan dengan manajemen. Oleh karena itu sikap independen komisaris yang mewakili pemegang saham adalah penting bagi berjalannya operasi perusahaan yang sehat bagi kepentingan *stakeholder*. Apabila proporsi komisaris independen cukup besar maka diharapkan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen dengan lebih baik atau dapat mencegah adanya intervensi dari komisaris tidak independen maupun manajemen terhadap komite audit. Keadaan ini akan membuat komite audit menjadi independen sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan atas proses laporan keuangan perusahaan dengan efektif, karena faktor yang sangat penting yang membuat komite

audit dapat menjalankan perannya dengan efektif adalah apabila komite audit bersifat independen.

Pengukuran proporsi komisaris independen menurut Greco (2011); Yin et.al. (2012); Restria & Cahyonowati (2014) yaitu dengan menggunakan proporsi komisaris independen per total angka anggota dewan komisaris independen dan non independen.

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sebagai acuan untuk penelitian ini, terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevam dan dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti. Secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Jurnal, Pengarang	Metode	Hasil
1.	<p>Penentu Frekuensi Rapat Komite Audit: Bukti Pelaksanaan Good Corporate Governance di Indonesia Sutaryo, Payamta, Bandi</p>	<p>Populasi: Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009</p> <p>Sampel: 150 perusahaan yang sesuai dengan kriteria tahun 2009</p> <p>Data dan Sumber Data: Laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan</p> <p>Operasional Variabel: Karakteristik keuangan perusahaan, struktur kepemilikan, kualitas audit, karakteristik komite audit, dan karakteristik dewan komisaris</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Ukuran perusahaan, rugi perusahaan, kepemilikan institusional, kualitas auditor eksternal berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit</p> <p>Kepemilikan manajerial dan kompetensi komite audit berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit</p> <p>Pertumbuhan perusahaan, ukuran komite audit, independensi komite audit, ukuran dan independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap jumlah rapat komite audit</p>
2.	<p>Determinants Of Audit Committee Meeting Frequency: Evidence From Chinese Listed Companies Managerial Auditing Journal, Vol. 27 Iss 4 pp.</p>	<p>Populasi: 1384 perusahaan yang terdaftar di Shanghai dan Shenzhen Stock Exchange pada tahun 2007</p> <p>Sampel: 312 perusahaan di 2007 dan total pada tahun fiskal</p>	<p>Independen, kompetensi komite audit, leverage, dan pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap frekuensi rapat komite audit</p> <p>Ukuran komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit.</p>

	425 - 444 Tahun 2012 Feng Yin Simon Gao Wanli Li Huaili Lv	2007-2010 sebanyak 1248 (312*4) Operasional Variabel: Proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dan sifat dasar dari pemegang saham mayoritas apakah dipegang oleh pemerintah atau swasta, ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dualitas CEO, ukuran dewan, auditor eksternal, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan pertumbuhan Teknik Analisis: Regresi berganda	Proporsi saham yang dimiliki pemegang saham mayoritas dan ukuran dewan tidak berpengaruh.
3.	Determinants of Audit Committees' Activity: Evidence From The UK Social Responsibility Journal, Vol. 8 Iss 4 pp. 471 - 483 Ismail Adelopo, Kumba Jallow and Peter Scott	Populasi: Perusahaan yan terdaftar di London Stock Exchange tahun 2006 Sampel: 245 perusahaan Data dan Sumber Data: Laporan tahunan Operasional Variabel: Jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen,	Proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran dewan, dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap aktifitas komite audit.

		<p>frekuensi rapat dewan komisaris, keahlian anggota komite audit, piagam komite audit, ukuran komite audit, dan struktur kepemilikan</p> <p>Teknik Analisis: Regresi berganda</p>	
4.	<p>Determinants of board and audit committee meeting frequency Managerial Auditing Journal, Vol. 26 Iss 3 pp. 208 - 229 Giulio Greco</p>	<p>Populasi: Semua perusahaan yang terdaftar di Italian Stock Exchange</p> <p>Sampel: Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Italian Stock Exchange</p> <p>Data dan Sumber Data: Laporan tahunan</p> <p>Operasional Variabel: Kepemilikan yang terkonsentrasi, Insider Ownership, ukuran dewan, dualitas CEO, proporsi komisaris independen, dan keberadaan komisaris independen sebagai ketua</p> <p>Teknik Analisis: Regresi Binomial Negatif</p>	<p>Konsentrasi kepemilikan dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit</p> <p>Proporsi komisaris independen dan kepemilikan internal berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit</p>
5.	<p>The Effects of Ownership Structure and Board</p>	<p>Populasi: Perusahaan non keuangan yang terdaftar di</p>	<p>Kepemilikan saham oleh direksi, kepemilikan saham dari tiga pemegang saham terbesar, ukuran perusahaan,</p>

	<p>Composition on the Audit Committee Meeting Frequency: Spanish evidence Vol. 15 No. 5 pp. 909-922, September 2007 Carlos Fernandez Mendez dan Ruben Arrondo Garcia</p>	<p>Madrid Stock Exchange Sampel: 69 perusahaan non keuangan yang memenuhi <i>purposive sampling</i> Data dan Sumber Data: Laporan tahunan Operasional Variabel: Komite audit aktif, Kepemilikan saham direksi, CEO sebagai dewan, kepemilikan saham dari tiga pemegang saham terbesar, proporsi dewan direksi independen, proporsi komite audit direksi independen, proporsi dewan direksi eksekutif, proporsi komite audit direksi eksekutif, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> Teknik Analisis: Regresi Binomial Negatif</p>	<p>dan leverage menunjukkan tidak signifikan. Proporsi komite audit direksi eksekutif tidak berpengaruh. CEO sebagai dewan positif tidak signifikan.</p>
6.	<p>Determinants of Audit Committee Meeting Frequency: Evidence from a Voluntary Governance System</p>	<p>Populasi: Semua perusahaan yang terdaftar di Selandia Baru Sampel: 96 perusahaan yang memenuhi</p>	<p>Rasio nilai pasar negatif signifikan. Ukuran perusahaan, leverage, kerugian tidak signifikan. Kepemilikan saham oleh manajemen positif signifikan. Kepemilikan saham oleh direksi luar tidak</p>

	<p>Accounting Horizon Vol. 23, No. 3, 2009, pp. 245-263 Vineeta Sharma, Vic Nalker, Barry Lee</p>	<p><i>purposive sampling</i> Data dan Sumber Data: Laporan tahunan Operasional Variabel: Ukuran perusahaan,, <i>leverage,</i> kerugian, nilai pasar, kepemilikan saham oleh manajemen, kepemilikan saham oleh direksi luar, kepemilikan saham oleh institusi, auditor eksternal, perusahaan teratur, ukuran dewan, direksi non eksekutif, ukuran komite audit, anggota komite audit ahli akuntansi, direksi non eksekutif di komite audit, komite audit yang menjadi direktur independen Teknik Analisis: Regresi berganda</p>	<p>signifikan. Auditor eksternal dan perusahaan teratur berpengaruh negatif terhadap pertemuan komite audit. Kepemilikan saham oleh institusi berpengaruh positif signifikan. Ukuran dewan tidak berpengaruh. Ukuran komite audit positif signifikan. Anggota komite audit yang ahli akuntansi dan ukuran dewan tidak signifikan. Direksi non eksekutif komite audit berpengaruh negatif signifikan dan ketua komite audit yang menjadi direktur independen.</p>
--	---	---	--

Sumber: data diolah oleh penulis (2016)

C. Kerangka Teoritik

Berdasarkan hasil penelitian tersebut masih terjadi *research gap* yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sehingga perlu

dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit.

Frekuensi rapat komite audit merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat meningkatkan *auditing* dan pelaporan kualitas perusahaan. Frekuensi rapat komite audit merupakan bentuk pengawasan perusahaan yang akan dikenakan dalam biaya agensi. Munculnya biaya agensi dikarenakan adanya asimetri informasi antara kepemilikan dan manajemen. Hal tersebut menyebabkan konflik kepentingan karena *moral hazard* dan masalah *adverse selection* terkait dengan permasalahan ini. Oleh karena itu, biaya agensi muncul dalam bentuk pengawasan yaitu frekuensi rapat komite audit untuk mengurangi konsekuensi yang merugikan dari asimetri informasi. Frekuensi rapat komite audit dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan pihak internal perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen.

Konsentrasi kepemilikan merupakan kondisi dimana pemegang saham memiliki jumlah saham yang besar yang dimiliki para pemegang saham dari saham perusahaan. Semakin besar konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki maka pengawasan yang dilakukan dari kepemilikan tersebut semakin besar, memungkinkan menurunnya frekuensi rapat komite audit.

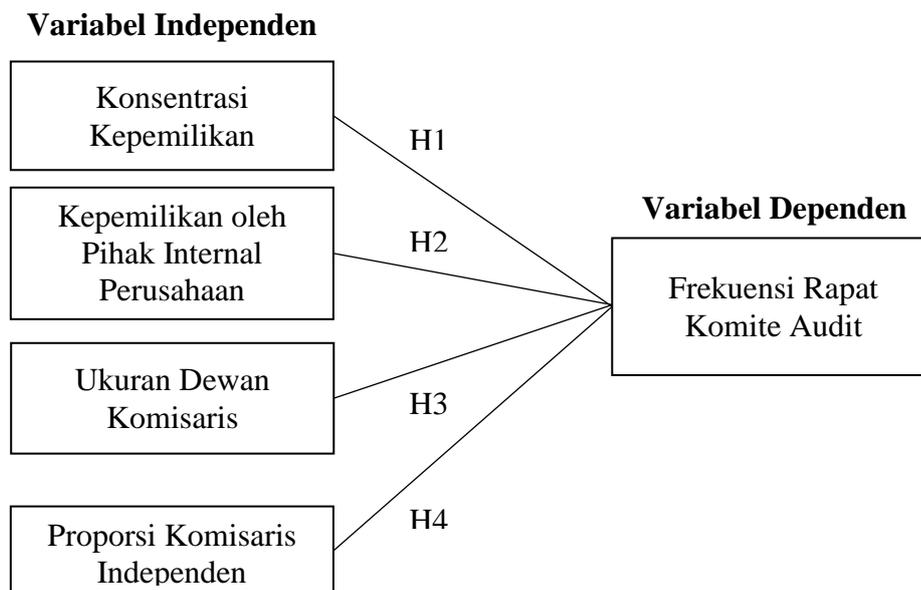
Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial perusahaan. Kepemilikan ini merupakan konsekuensi adanya kompensasi kepemilikan saham yang diberikan oleh perusahaan untuk manajemen. Kepemilikan pihak internal ini dapat menggantikan

mekanisme pengawasan lainnya, yang mengakibatkan hubungan negatif dengan frekuensi rapat komite audit.

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan yang lebih besar memberikan akses ke sumber daya yang lebih besar dan bakat manajerial yang lebih tinggi, sehingga memberikan pemantauan yang lebih efektif. Hal tersebut cenderung menurunkan frekuensi rapat komite audit.

Selain itu, ada proporsi komisaris independen yang merupakan suatu persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh perusahaan tercatat di bursa efek untuk menciptakan tata kelola yang baik di dalam perusahaan. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan karyawan atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut dan tidak mewakili pemegang saham. Adanya kewenangan komisaris independen untuk membawahi komite audit, membuat tanggung jawab seorang komisaris independen yang menjadi ketua komite audit menjadi lebih besar dari anggota komisaris lainnya. Apabila proporsi komisaris independen cukup besar maka diharapkan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen dengan lebih baik atau dapat mencegah adanya intervensi dari komisaris tidak independen maupun manajemen terhadap komite audit. Dengan faktor tersebut proporsi komisaris independen dapat membuat peningkatan frekuensi rapat komite audit.

Dari beberapa uraian tersebut kerangka berfikir digambarkan dengan bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Teoritik

Sumber: data diolah oleh penulis (2016)

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis dari penelitian yang akan disajikan berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai diuraikan sebagai berikut:

1. Konsentrasi Kepemilikan dan Frekuensi Rapat Komite Audit

Pemegang saham mayoritas memiliki insentif untuk mengawasi secara ketat terhadap manajemen dan menuntut mekanisme yang efektif dalam memastikan tata kelola perusahaan dilaksanakan (Leftwich et al., 1981; Shleifer dan Vishny, 1997; dalam Greco, 2011). Teori agensi menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan menghasilkan insentif untuk mengambil atau mendapatkan keuntungan pribadi. Masalah agensi antara pemegang saham dan manajer akan berkurang oleh

pengawasan pemegang saham mayoritas dan pemantauan perilaku manajer (Yin et al., 2012). Shleifer dan Vishny (1986) dan Mendez dan Garcia (2007) dalam Yin et al. (2012), berpendapat bahwa ketika kepemilikan saham relatif terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas memiliki motivasi yang kuat untuk mengawasi manajer perusahaan karena klaim mereka untuk laba lebih besar. Konsentrasi kepemilikan yang lebih besar akan menyebabkan berkurangnya frekuensi rapat komite audit, karena pemegang saham mempunyai andil yang besar dalam pengawasan. Mendez & Garcia (2007) mengamati bahwa peningkatan nilai saham yang berasal dari pengawasan oleh pemegang saham mayoritas dapat mengimbangi biaya pengawasan langsung dikeluarkan. Oleh karena itu keberadaan pemegang saham mayoritas menjadi cara yang efektif untuk meredakan kepentingan konflik antara manajer dan pemegang saham.

Shleifer dan Vishny (1997) menunjukkan bahwa ketika kepemilikan saham terkonsentrasi ke tingkat tertentu pemegang saham yang besar hampir dapat mengendalikan perusahaan; yang pertama pemegang saham besar cenderung untuk menyadari utilitas sendiri dengan cara mengambil alih pemegang saham minoritas. Dalam memengaruhi komite audit dapat menahan pemegang saham mayoritas mengambil alih (McMullen dan Raghunandam, 1996). Jika pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan lebih dalam mengendalikan perusahaan, kemungkinan menggunakan hak kontrol untuk menghambat komite audit untuk memainkan peran pengawasan diharapkan akan lebih tinggi (Yin et. al., 2011). Oleh karena

itu, kemungkinan bahwa ada hubungan negatif antara proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dan jumlah pertemuan komite audit. Sehingga berdasarkan hal tersebut untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap frekuensi rapat komite audit.

H1 : Konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit.

2. Kepemilikan oleh Pihak Internal Perusahaan dan Frekuensi Rapat Komite Audit

Teori agensi menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham sebagai akibat dari pemisahan kepemilikan dan manajemen. Terdapat dua pengaruh kepemilikan oleh pihak internal perusahaan yaitu dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham serta untuk mengurangi biaya agensi (Greco, 2011). Tingginya tingkat keselarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham mayoritas diharapkan dapat mengurangi biaya agensi (Greco, 2011). Kepemilikan oleh manajemen mengurangi biaya agensi karena kepemilikan saham dalam perusahaan akan memotivasi manajemen untuk berperilaku seperti pemegang saham. Hal ini akan berdampak pada menurunnya asimetri informasi karena manajer sebagai pemegang saham secara langsung turut serta dalam aktivitas operasional dan pengawasan perusahaan. *Insider ownership* ditemukan berhubungan negatif dengan frekuensi rapat komite audit (Mendez dan Garcia, 2007).

Dengan meningkatnya kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, maka diprediksi akan menurunkan jumlah frekuensi rapat komite audit karena menurunnya kebutuhan pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Dalam sisi lain, kepemilikan pihak internal yang tinggi dapat lebih memihak manajemen dan direksi, sehingga meningkatkan biaya keagenan (Sutaryo *et. al.*, 2010). Sehingga berdasarkan hal tersebut maka diprediksikan kepemilikan oleh pihak internal perusahaan mempunyai pengaruh dengan frekuensi rapat komite audit.

H2 : Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit.

3. Ukuran Dewan Komisaris dan Frekuensi Rapat Komite Audit

Salah satu faktor penting yang dianggap mempengaruhi aktivitas dewan komisaris adalah ukuran dewan komisaris (Greco, 2011). Ukuran dewan yang lebih besar kemungkinan adalah bentuk *Good Corporate Governance* yang tidak efisien karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga menyebabkan frekuensi rapat komite audit akan lebih sering (Vafeas, 1999). Jumlah anggota dewan yang lebih banyak bisa menyebabkan keragaman perspektif yang lebih nyata dalam diskusi. Namun demikian, ukuran dewan komisaris yang meningkat, dapat juga menyebabkan penurunan aktivitas komite audit (Greco, 2011). Jumlah dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan berkurangnya jumlah frekuensi rapat komite audit, karena ukuran dewan yang besar memberi akses sumber daya dan bakat manjerial yang tinggi (Sutaryo *et. al.*, 2010).

Hal tersebut akan meningkatkan efektivitas pemantauan oleh dewan komisaris. Sebaliknya, ukuran yang lebih besar kemungkinan adalah bentuk *governance* yang tidak efisien, sehingga menyebabkan pertemuan komite audit yang lebih sering (Sutaryo *et.al.*, 2010). Namun, penelitian lain (Anderson et al., 2004; Hermalin dan Weisbach, 2003; Yermack, 1996) dalam Adelopo (2012) menunjukkan bahwa ukuran dewan yang besar bisa memperlambat proses dan mungkin merupakan halangan untuk pengambilan keputusan yang efektif oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka ingin mengetahui ukuran dewan komisaris apakah mempunyai pengaruh dengan frekuensi rapat komite audit.

H3 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit.

4. Proporsi Komisaris Independen dan Frekuensi Rapat Komite Audit

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris yang independen dapat memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen (Sutaryo *et. al.*, 2010). Kerangka teori menunjukkan bahwa dewan direksi yang terdiri dari direktur independen cenderung melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Dahya dan McConnell (2005) mencatat bahwa dengan dewan yang lebih mandiri membuat keputusan strategis yang lebih baik. Greco (2011) berpendapat bahwa komisaris independen cenderung menuntut frekuensi rapat dewan komisaris yang lebih banyak untuk meningkatkan efektivitas dewan komisaris dalam mengawasi manajemen. Komisaris independen dapat menuntut pengawasan internal yang lebih

besar atas proses pelaporan keuangan untuk melindungi reputasi mereka (Menon & Williams, 1994) Tuntutan ini dapat mengakibatkan komite audit lebih sering mengadakan rapat. Menon dan Williams, 1994 (dalam Greco, 2011) menemukan bahwa dalam sampel perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, aktivitas komite audit secara positif terkait dengan proporsi komisaris independen. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen pada komposisi anggota dewan komisaris, maka akan semakin sering komite audit mengadakan rapat. Adelopo (2014) berpendapat bahwa dewan independen akan meningkatkan aktivitas komite audit. Hal ini karena sebagian besar tata kelola perusahaan membutuhkan komite audit terutama yang terdiri dari dewan independen, yang memungkinkan meningkatnya aktivitas komite audit.. Berdasarkan hal tersebut maka menguji dugaan bahwa proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit.

H4 : Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritik yang sudah digambarkan pada Bab II, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Memberikan fakta dan bukti empiris baru terkait dengan pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap frekuensi rapat komite audit;
2. Memberikan fakta dan bukti empiris baru terkait dengan pengaruh kepemilikan oleh pihak internal terhadap frekuensi rapat komite audit;
3. Memberikan fakta dan bukti empiris baru terkait dengan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap frekuensi rapat komite audit;
4. Memberikan fakta dan bukti empiris baru terkait dengan pengaruh proporsi komisaris independen terhadap frekuensi rapat komite audit.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id.

Adapun ruang lingkup penelitian meliputi pembatasan variabel konsentrasi kepemilikan dibatasi berdasarkan persentase saham umum terbesar yang dimiliki investor pada perusahaan, kepemilikan oleh pihak internal dibatasi berdasarkan jumlah saham umum yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi, ukuran dewan komisaris dibatasi berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen dibatasi dengan persentase komisaris independen dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris, serta frekuensi rapat komite audit dibatasi berdasarkan jumlah rapat komite audit yang diadakan selama tahun 2014.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional dengan data sekunder untuk keempat variabel yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen diperoleh dari laporan tahunan perusahaan non keuangan yang tercatat pada *website* Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode ini digunakan karena peneliti berusaha mengetahui pengaruh dari variabel independen yang terdiri dari konsentrasi kepemilikan, kepemilikan pihak internal, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen terhadap variabel dependennya yaitu frekuensi rapat komite audit.

D. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan keuangan tidak termasuk ke dalam sampel penelitian karena memiliki aturan atau regulasi yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Karena dengan menggunakan *purposive sampling*, diharapkan kriteria sampel yang diperoleh sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah:

1. Perusahaan non-keuangan yang telah menerbitkan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014.
2. Perusahaan yang memiliki data yang lengkap yang dapat digunakan untuk menganalisis konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen terhadap frekuensi rapat komite audit.

E. Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah karakteristik yang nilai datanya bervariasi dari satu pengukuran ke pengukuran lainnya. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah frekuensi rapat komite audit. Variabel independen penelitian ini meliputi konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan (*Insider Ownership*), ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah frekuensi rapat komite audit. Variabel frekuensi rapat komite audit dapat dinyatakan dalam bentuk definisi konseptual dan operasional sebagai berikut:

a. Definisi Konseptual

Frekuensi rapat komite audit adalah salah satu aktivitas rutin dengan melakukan pertemuan secara formal antar anggota komite audit, dewan komisaris, dewan direksi, maupun auditor eksternal (Rustiarini & Sugiarti, 2013). Komite audit dapat mengadakan rapat secara periodik sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri.

b. Definisi Operasional

Pada penelitian ini, variabel frekuensi rapat komite audit menggunakan pengukuran sebagai berikut:

<p><i>Frekuensi Rapat Komite Audit</i></p> $= \sum \text{Jumlah Rapat Komite Audit tahun 2014}$

(Greco, 2011)

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan (*Insider Ownership*), ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen.

a. Konsentrasi Kepemilikan

1) Definisi Konseptual

Konsentrasi kepemilikan terjadi jika terdapat seorang atau beberapa orang investor yang menguasai secara signifikan saham yang beredar dari suatu perusahaan. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya (Dallas, 2004 dalam Nuryaman, 2009).

2) Definisi Operasional

Pengukuran variabel konsentrasi kepemilikan dalam penelitian ini adalah persentase saham terbesar yang dimiliki oleh seorang investor di dalam perusahaan (Greco, 2011; Restria dan Cahyonowati, 2014). Oleh sebab itu, variabel konsentrasi kepemilikan menggunakan pengukuran yaitu:

$$\text{Konsentrasi Kepemilikan} = \% \text{ Saham Terbesar}$$

(Yin et. al., 2012)

b. Kepemilikan oleh Pihak Internal Perusahaan (*Insider Ownership*)

1) Definisi Konseptual

Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajerial perusahaan. Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat juga diartikan sebagai jumlah persentase saham yang dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi suatu perusahaan, di mana mereka ikut aktif dalam pengambilan keputusan.

2) Definisi Operasional

Pengukuran variabel ini berdasarkan jumlah persentase saham biasa yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris dan dewan direksi (Greco, 2011; Restria dan Cahyonowati, 2014; Raghunandan dan Rama, 2007). Oleh sebab itu, variabel kepemilikan oleh pihak internal perusahaan menggunakan data matrik dengan skala pengukuran rasio.

$$\begin{aligned} & \textit{Kepemilikan Oleh Pihak Internal} \\ & = \% \textit{ Saham yang Dimiliki Direksi dan Komisaris} \end{aligned}$$

(Greco, 2011)

c. Ukuran Dewan Komisaris

1) Definisi Konseptual

Karakteristik direksi dan CEO mungkin sebagai penentu rapat dewan komisaris (Greco, 2011). Salah satu faktor penting yang dianggap mempengaruhi aktivitas dewan komisaris adalah ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat. Karena ukuran yang besar memungkinkan komposisi yang lebih lengkap berkaitan dengan keahlian, independensi, dan kemampuan.

2) Definisi Operasional

Variabel ukuran dewan komisaris menggunakan data matrik dengan skala pengukuran interval. Variabel ini diukur berdasarkan:

$$Ukuran\ Dewan\ Komisaris = \sum\ Dewan\ Komisaris$$

(Greco, 2011, Restria dan Cahyonowati, 2014; Raghunandan dan Rama, 2007; Yin et al., 2012).

d. Proporsi Komisaris Independen

1) Definisi Konseptual

Proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris berkontribusi untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan karyawan atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut dan tidak mewakili pemegang saham.

2) Definisi Operasional

Pengukuran variabel proporsi komisaris independen berdasarkan proporsi komisaris independen dibandingkan dengan jumlah keseluruhan komisaris (Greco, 2011; Yin et al., 2012; Restria dan Cahyonowati, 2014). Oleh sebab itu, variabel proporsi komisaris independen menggunakan data matrik dengan skala pengukuran rasio.

$$Proporsi\ Komisaris\ Independen = \frac{\sum\ Komisaris\ Independen}{\sum\ Dewan\ Komisaris}$$

(Greco, 2011; Yin et al., 2012; Restria dan Cahyonowati, 2014)

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis utama yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi

untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, dilakukan terlebih dahulu analisis statistik deskriptif dan dilakukan pengujian kelayakan model regresi. Berikut ini penjelasan terperinci mengenai metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2013). Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi, nilai terendah, dan standar deviasi.

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui distribusi data baik dari variabel dependen maupun variabel independen. Uji analisis statistik deskriptif dilakukan sebelum menganalisis data menggunakan regresi linier berganda. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas karakteristik data yang bersangkutan.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya

estimasi regresi yang bias. Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolenieritas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan uji jarque-bera.

Pada program EViews, pengujian normalitas dilakukan dengan uji jarque-bera. Uji jarque-bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal (Winarno, 2009). Uji Jarque-Bera mempunyai nilai chi square dengan derajat bebas dua. Jika hasil uji jarque-bera lebih besar dari nilai chi square pada $\alpha = 5\%$, maka hipotesis nol diterima yang berarti data berdistribusi normal. Jika hasil uji jarque-bera lebih kecil dari nilai chi square pada $\alpha = 5\%$, maka hipotesis nol ditolak yang artinya tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolenieritas

Uji multikolenieritas digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Menurut Winarno (2009) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai R^2 tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Dengan menghitung koefisien korelasi antarvariabel independen. Apabila koefisien rendah, maka tidak terdapat multikolinearitas.
- 3) Dengan melakukan regresi *auxiliary*. Regresi ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua (atau lebih) variabel independen yang secara bersama-sama mempengaruhi satu variabel independen lainnya. Regresi ini akan dilakukan beberapa kali dengan cara memberlakukan satu variabel independen sebagai variabel dependen dan variabel independen lainnya tetap menjadi variabel independen. Masing-masing persamaan akan dihitung nilai F-nya. Jika nilai $F_{hitung} > F_{kritis}$ pada α dan derajat kebebasan tertentu, maka model kita mengandung unsur multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homokedastisitas, yaitu varian residual konstan satu pengamatan ke pengamatan lain. Akan tetapi, nilai residual sulit memiliki varian yang konstan, terutama pada data *cross section*. Menurut (Winarno,2009) ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas, yaitu:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Metode grafik | e. Uji Goldfeld-Quandt |
| b. Uji Park | f. Uji Breusch-Pagan-Godfrey |
| c. Uji Glejser | |
| d. Uji Korelasi Spearman | g. Uji White |

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas menggunakan uji white. Uji white menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel independennya terdiri atas variabel independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel independen, ditambah lagi dengan perkalian dua variabel independen (Winarno, 2009). Pengujian ini dilakukan dengan bantuan program Eviews 7 yang akan memperoleh nilai probabilitas

Obs*R- square yang nantinya akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α). Jika nilai probabilitas signifikansinya di atas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya di bawah 0,05 maka dapat dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel independen. Bila hanya ada satu variabel dependen dan satu variabel independen, disebut analisis regresi sederhana. Apabila terdapat beberapa variabel independen, analisisnya disebut dengan analisis regresi berganda (Winarno 2009). Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara keempat variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Pengambilan hipotesis dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang menggunakan Eviews. Jika angka signifikansi lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Rumus persamaan regresi linier ganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$ACMEET = \alpha + \beta_1 COWN + \beta_2 INOWN + \beta_3 BCSIZE + \beta_4 IND + \varepsilon$$

Keterangan :

ACMEET = frekuensi rapat komite audit tahun 2014

COWN = konsentrasi kepemilikan, persentase saham biasa yang dimiliki oleh pemilik saham terbesar

INOWN = kepemilikan pihak internal perusahaan, persentase saham biasa yang dimiliki oleh komisaris dan direksi

BCSIZE = ukuran dewan komisaris, dihitung dari jumlahnya

IND = proporsi komisaris independen per total anggota dewan komisaris

α = konstanta

β = koefisien regresi

ε = standar error

4. Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga alat yaitu : uji statistik t, uji koefisien determinasi (R²), dan uji statistik f .

a. Uji Regresi Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial atau individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis pengujian ini adalah:

H_0 : Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H_a : Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Kriteria pengujian dapat dilihat melalui dua cara, yaitu:

1) Berdasarkan perbandingan nilai t-satistik (t_{hitung}) dari masing-masing koefisien variabel independen terhadap nilai t_{tabel} pada tingkat kepercayaan $(1-\alpha)*100\%$.

H_0 : ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti terdapat pengaruh.

H_0 : diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, berarti tidak terdapat pengaruh.

Nilai t_{hitung} diperoleh dari:

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{s.e(\beta_i)}$$

Keterangan:

β_i = koefisien slope regresi

$s.e \beta_i$ = koefisien slope regresi

2) Berdasarkan probabilitas (ρ)

H_0 : ditolak jika $\rho < \alpha$, berarti terdapat pengaruh.

H_0 : diterima jika $\rho > \alpha$, berarti tidak terdapat pengaruh.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kesesuaian model penelitian yang digunakan. R^2 mencerminkan seberapa besar perubahan variabel dependen yang dapat ditentukan oleh perubahan variabel-variabel independen. Nilai R^2 adalah $0 < R^2 < 1$. Semakin tinggi (mendekati satu) nilai R^2 berarti semakin kuat hubungan variabel dependen dan variabel independen dan model yang digunakan telah sesuai. Atau dengan kata lain, kemampuan variabel independen semakin tinggi dalam menentukan perubahan variabel dependen.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Hipotesis pengujian ini adalah:

H_0 : Variabel-variabel independen tidak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H_1 : Variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian ini dapat dilihat melalui dua cara, yaitu:

1) Perbandingan F-statistik (F_{hitung}) dengan $F_{tabel}(\alpha, k, n-k-1)$

H_0 : Ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti berpengaruh secara bersama-sama.

H_0 : Diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, berarti tidak berpengaruh secara bersama-sama.

Nilai F_{hitung} diperoleh dari:

$$F_{hitung} = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SSR/k}{SSE/(n-k-1)}$$

Keterangan:

MSR = Mean Square Regression

MSE = Mean Square Error

SSR = Sum of Square Regression

SSE = Sum of Square Error

k = jumlah observasi

n = jumlah variabel yang dipakai

2) Berdasarkan probabilitas (ρ)

H_0 : Ditolak jika $\rho < \alpha$, berpengaruh secara bersama-sama.

H_0 : Diterima jika $\rho > \alpha$, berarti tidak berpengaruh secara bersama-sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Hasil Pemilihan Sampel

Data pada penelitian ini berupa data sekunder yaitu laporan tahunan perusahaan. Data ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen sebagai variabel independen serta frekuensi rapat komite audit sebagai variabel dependen. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun kriteria pemilihan sampel yang digunakan yaitu:

- a. Perusahaan non-keuangan yang telah menerbitkan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014.
- b. Perusahaan yang memiliki data yang lengkap yang dapat digunakan untuk menganalisis konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh

pihak internal, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen terhadap frekuensi rapat komite audit.

Dari kriteria tersebut, diperoleh jumlah sampel yang terangkum dalam tabel sampel penelitian di bawah ini:

Tabel 4.1

Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan non keuangan yang terdaftar pada tahun 2014	407
Perusahaan tidak memiliki data yang lengkap terkait jumlah frekuensi rapat komite audit yang diadakan	(35)
Perusahaan tidak memiliki data yang lengkap terkait persentase kepemilikan oleh pihak internal perusahaan	(141)
Perusahaan tidak memiliki data yang lengkap terkait jumlah komisaris independen	(3)
Jumlah sampel	228

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sampel pertama dalam penelitian ini adalah 407 perusahaan. Namun dengan adanya kriteria pemilihan sampel, maka diperoleh sampel yang sesuai dengan kriteria yaitu sebanyak 228 perusahaan non keuangan selama tahun 2014. Nama perusahaan yang dijadikan sampel dapat dilihat pada Lampiran 2.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan analisis regresi, diperlukan analisis untuk mengetahui informasi yang terdapat di dalam data yang digunakan di dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan

atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Pada penelitian ini akan menganalisis mengenai nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah dan standar deviasi dari variabel-variabel independen maupun dependen. Dimana variabel independen pada penelitian ini adalah konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen, sedangkan frekuensi rapat komite audit sebagai variabel dependen. Pengukuran dilakukan dengan bantuan program Eviews 9. Adapun hasil analisis deskriptif dapat dijabarkan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	ACMEET	COWN	INOWN	BCSIZE	IND
Mean	7.574561	0.547072	0.041064	4.394737	0.401772
Median	5.000000	0.524000	0.000600	4.000000	0.333000
Maximum	48.00000	0.992000	0.700000	22.00000	0.800000
Minimum	1.000000	0.176800	0.000000	2.000000	0.167000
Std. Dev.	7.170587	0.178610	0.111314	2.142987	0.101327
Observations	228	228	228	228	228

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2016

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 4.2 didapatkan informasi mengenai nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen dan dependen yang akan diuji dalam penelitian ini. Berdasarkan informasi tersebut, maka

dapat dijelaskan analisis statistik deskriptif seluruh pengamatan penelitian dengan variabel-variabel sebagai berikut:

a. Variabel Dependen

1) Frekuensi Rapat Komite Audit

Pada penelitian ini, variabel dependen dalam penelitian ini adalah frekuensi rapat komite audit diproksikan dengan jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2 di atas menjelaskan bahwa rapat komite audit memiliki hasil nilai minimum minimum 1 dan maksimum 48. Nilai minimum tersebut diperoleh dari jumlah rapat komite audit PT Tanah Laut Tbk pada tahun 2014. Sedangkan jumlah rapat komite audit yang memiliki nilai maksimum yaitu perusahaan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Selanjutnya, berdasarkan tabel yang sama dapat dilihat dari 228 observasi yang dimiliki, variabel ini menghasilkan rata-rata sebesar 7.574561 dan standar deviasi sebesar 7.170587. Hasil standar deviasi yang diperoleh variabel frekuensi rapat komite audit lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya, menunjukkan simpangan data frekuensi rapat komite audit relatif baik dan terdapat variasi dalam frekuensi rapat komite audit.

Nilai rata-rata yang didapat menunjukkan bahwa rapat yang dilaksanakan 228 perusahaan non keuangan observasi sebanyak 7 kali rapat. Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi Blue Ribbon Committe,

KPMG, dan PwC yang mengusulkan perusahaan minimal melaksanakan empat kali rapat dalam setahun untuk komite audit menjadi efektif.

b. Variabel Independen

1) Konsentrasi Kepemilikan

Variabel independen pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah konsentrasi kepemilikan. Variabel tersebut diproksikan dengan persentase saham terbesar yang dimiliki investor. Nilai minimum dimiliki oleh PT Sekar Bumi Tbk pada variabel konsentrasi kepemilikan sebesar 0,1768. Sedangkan nilai maksimum diperoleh dari variabel konsentrasi kepemilikan saham terbesar yang dimiliki PT Bukit Darmo Property Tbk sebesar 0,9920. Nilai maksimum tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi saham pada perusahaan dimiliki oleh investor mencapai nilai yang sangat tinggi yaitu 99%. Sedangkan 17,68% hasil nilai minimum konsentrasi kepemilikan yang terkecil dibandingkan dengan perusahaan non keuangan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari 228 jumlah observasi yang ada dalam penelitian ini.

Nilai rata-rata atau *mean* yang dimiliki oleh variabel konsentrasi kepemilikan adalah 0,5470 dengan standar deviasi 0,1786. Nilai rata-rata dari variabel konsentrasi kepemilikan menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan non keuangan di Indonesia yang dijadikan sampel pada penelitian ini mempunyai konsentrasi kepemilikan yang cukup tinggi yaitu 54,5%. Hasil standar deviasi yang diperoleh variabel konsentrasi

kepemilikan lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya, menunjukkan simpangan data konsentrasi kepemilikan relatif baik dan terdapat variasi dalam konsentrasi kepemilikan.

2) Kepemilikan Oleh Pihak Internal Perusahaan

Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh dewan komisari dan dewan direksi pada perusahaan. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2 menunjukkan nilai maksimum pada variabel kepemilikan oleh pihak internal sebesar 0,7000 yang dimiliki oleh PT Sat Nusapersada Tbk. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,0000 yang dimiliki 112 perusahaan dari 228 observasi dalam penelitian ini, beberapa diantaranya yaitu PT Eagle High Plantations Tbk, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk, PT Garda Tujuh Buana Tbk, PT Harum Energy Tbk, PT Samido Resources Tbk, PT Golden Eagle Energy Tbk.

Diperoleh hasil rata-rata kepemilikan oleh pihak internal perusahaan sebesar 0,0411 pada tahun 2014 yang ditunjukkan pada Tabel 4.2. Hal tersebut menunjukkan rata-rata anggota dewan komisaris dan dewan direksi pada perusahaan non keuangan di dalam sampel penelitian ini memiliki saham perusahaan sebesar 4,11%. Hasil nilai standar deviasi yang diperoleh variabel kepemilikan oleh pihak internal perusahaan lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-ratanya, nilainya adalah 0,1113. Menunjukkan simpangan data kepemilikan oleh pihak

internal relatif tidak baik dan tidak terdapat variasi dalam kepemilikan oleh pihak internal perusahaan.

3) Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris di dalam perusahaan. Pada variabel ukuran dewan komisaris, nilai minimum dimiliki oleh PT Dharma Samudera Fishing Ind Tbk, PT Ratu Prabu Energi Tbk, PT Bentonjaya Manunggal Tbk, PT Jaya Pari Steel Tbk, PT Lotte Chemical Titan Tbk, PT Langgeng Makmur Industri Tbk, PT Greenwood Sejahtera Tbk, PT Sitara Propertindo Tbk, PT Acset Indonusa Tbk, PT Tanah Laut Tbk, PT Steady Safe Tbk, PT Trada Maritime Tbk, PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk, PT Evergreen Invesco Tbk, PT Saraswati Griya Lestari Tbk, PT Graha Layar Prima Tbk, PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, PT Pool Advista Indonesia Tbk, dengan nilai sebesar 2,000. Angka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang sudah disebutkan memiliki jumlah anggota dewan komisaris sebanyak 2 orang. Sedangkan PT Metropolitan Kentjana Tbk yang memiliki nilai maksimum sebesar 22,000 setara dengan nilai 22 orang dewan komisaris dari variabel ukuran dewan komisaris.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2 di atas diperoleh hasil rata-rata nilai ukuran dewan komisaris sebesar 4,3947 dengan standar deviasi sebesar 2,1429. Hal tersebut menunjukkan bahwa simpangan data variabel ukuran dewan komisaris relatif baik dan

terdapat variasi dalam ukuran dewan komisaris karena nilai dari rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi.

4) Proporsi Komisaris Independen

Variabel proporsi komisaris independen, yang diproksikan dengan perbandingan jumlah komisaris independen pada jumlah dewan komisaris, adalah variabel independen terakhir yang diuji dalam penelitian ini. Variabel proporsi komisaris independen memiliki nilai minimal yang dimiliki variabel ini, yaitu sebesar 0,1670 dimiliki oleh PT MNC Sky Vision Tbk. Menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki proporsi komisaris independen yang kecil yaitu satu dewan komisaris independen dari enam orang jumlah anggota dewan komisaris. Sedangkan nilai maksimalnya sebesar 0,8000 dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk yang memiliki 4 anggota dewan komisaris independen berbanding dengan 5 jumlah anggota dewan komisaris.

Dengan standar deviasi sebesar 0,1037. Selanjutnya, nilai rata-rata yang dimiliki sebesar 0,4018. Hal ini menunjukkan bahwa variabel proporsi komisaris independen memiliki simpangan data yang relatif baik dan terdapat variasi, dilihat dari nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi.

B. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal, ukuran dewan komisaris, dan

proporsi komisaris independen terhadap frekuensi rapat komite audit pada tahun 2014. Dalam melakukan pengujian, peneliti melakukan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Adapun hasil pengujian yang telah dilakukan sebagai berikut:

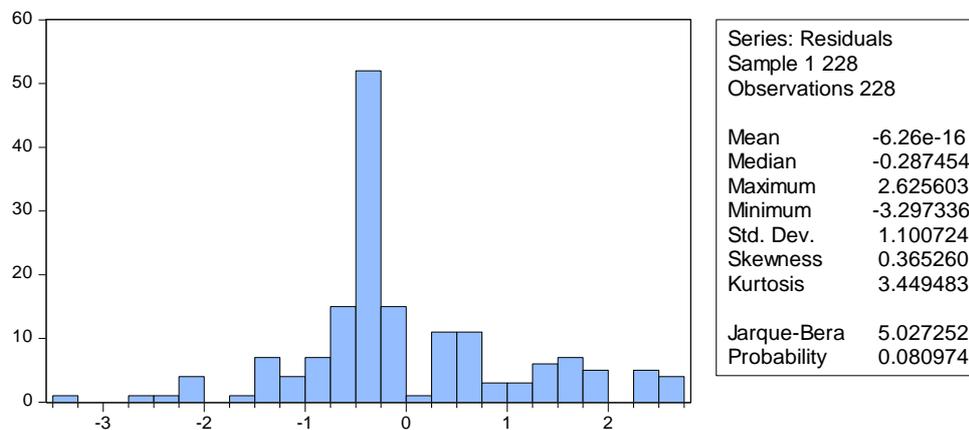
1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menganalisis model regresi dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik dan untuk memastikan bahwa model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis penelitian ini tidak memiliki masalah. Pada uji asumsi klasik menggunakan sampel sebanyak 228 perusahaan, hasil regresi menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil regresi tersebut menunjukkan data sudah memenuhi keseluruhan uji asumsi klasik. Adapun pengujian asumsi klasik yang dilakukan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *jarque-bera*. Uji *jarque-bera* mempunyai nilai *probability*, jika hasil uji *jarque-bera* lebih besar dari nilai *probability* pada signifikan 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika hasil uji *jarque-bera* lebih kecil dari nilai *probability* signifikan 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Adapun hasil pengujian uji normalitas yang ditunjukkan pada gambar 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4.1

Hasil Pengujian Uji Normalitas

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2016

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh gambar 4.1 diketahui bahwa *probability* lebih besar dari 0,05 meskipun tidak signifikan. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian yang telah dijabarkan terlihat bahwa hasil uji normalitas yaitu *probability* sebesar 0,080974 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Setelah melakukan uji normalitas, peneliti selanjutnya melakukan uji multikolinearitas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen. Menganalisis multikolinearitas diperoleh dari pengujian *Pearson Correlation*. Kriteria dari *Pearson Correlation* untuk uji

multikolinearitas yaitu jika nilai koefisien korelasinya melebihi 0,9 maka data penelitian terdapat multikolinearitas.

Adapun hasil pengujian uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil Pengujian Uji Multikolinearitas

	COWN	INOWN	BDSIZE	IND
COWN	1.000000			
INOWN	-0.156039	1.000000		
BDSIZE	-0.041488	0.046863	1.000000	
IND	0.101497	-0.110669	-0.108244	1.000000

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2016

Berdasarkan hasil pengujian yang tunjukkan oleh tabel 4.3, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel lebih kecil dari 0,9. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian *Pearson Correlation* yang telah dijabarkan terlihat bahwa hasil dari uji multikolinearitas tidak ada nilai koefisien korelasi antar variabel yang lebih dari 0,9. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak memiliki masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain.

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *white*. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dari nilai probabilitas Obs*R- square yang akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansinya di atas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian uji heteroskedastisitas yang tunjukkan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.013175	Prob. F(14,213)	0.4412
Obs*R-squared	14.23537	Prob. Chi-Square(14)	0.4323
Scaled explained SS	20.35115	Prob. Chi-Square(14)	0.1195

Sumber: Eviews 9, data diolah oleh peneliti, 2016

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 4.4, menunjukkan bahwa nilai probabilitas Obs*R-square sebesar 0,4323. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian uji *white* yang sebelumnya sudah dijelaskan dan terlihat bahwa dari uji *white* memiliki nilai probabilitas Obs*R-square lebih besar daripada signifikansi ($0,4323 > 0,05$). Maka disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi klasik, selanjutnya dapat melakukan analisis regresi linier berganda. Analisis ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen terhadap frekuensi rapat komite audit. Dengan menggunakan metode regresi linear berganda, didapatkan hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.259554	0.262032	4.806869	0.0000
COWN	0.251991	0.233559	1.078918	0.2818
INOWN	0.065897	0.375184	0.175640	0.8607
BCSIZE	0.299790	0.101697	2.947885	0.0035
IND	-0.087322	0.411141	-0.212389	0.8320

Sumber: Eviews 9, data diolah oleh penulis, 2016

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam tabel 4.5, dapat dituliskan model regresi sebagai berikut:

$$ACMEET = 1.259554 + 0.251991.COWN + 0.065897.INOWN + 0.299790.BCSIZE - 0.087322.IND + \varepsilon$$

Keterangan:

ACMEET = Frekuensi rapat komite audit

COWN = Konsentrasi kepemilikan

INOWN = Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan

BCSIZE = Ukuran dewan komisaris

IND = Proporsi komisaris independen

ϵ = standar error

Dari persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 1,259554 menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit akan bernilai 1,259554, jika semua variabel independen dianggap konstan.
- b. Koefisien variabel konsentrasi kepemilikan sebesar 0,251991 artinya menunjukkan bahwa konsentrasi berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit. Hal ini menggambarkan bahwa jika variabel konsentrasi kepemilikan meningkat, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan meningkatkan pula frekuensi rapat komite audit sebesar 0,251991 atau 25,1991%.
- c. Koefisien variabel kepemilikan oleh pihak internal perusahaan sebesar 0,065897 artinya menunjukkan bahwa kepemilikan oleh pihak internal perusahaan berpengaruh negatif terhadap frekuensi rapat komite audit. Hal ini menggambarkan bahwa jika variabel kepemilikan oleh pihak internal perusahaan naik satu satuan, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menurunkan tingkat frekuensi rapat komite audit sebesar 0,065897.
- d. Koefisien variabel ukuran dewan komisaris sebesar 0,299790 artinya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh

positif terhadap frekuensi rapat komite audit. Hal ini menggambarkan bahwa jika variabel ukuran dewan komisaris naik satu satuan, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menaikkan tingkat frekuensi rapat komite audit sebesar 0,299790 atau 29,9790%.

- e. Koefisien variabel proporsi komisaris independen sebesar -0,087322 artinya menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit. Hal ini menggambarkan bahwa jika variabel proporsi komisaris independen naik satu satuan, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menaikkan tingkat frekuensi rapat komite audit sebesar -0,087322.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga uji yaitu: uji statistik t, uji koefisien determinasi (R^2), dan uji statistik f.

a. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji statistik t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan perbandingan t_{tabel} dengan t_{hitung} . Cara mengetahui t_{tabel}

adalah dengan melihat tabel t berdasarkan $df = n - k - 1$. Dengan nilai n adalah 228 dan nilai $k = 4$, dimana n sebesar 228 adalah jumlah observasi dan $k = 4$ adalah jumlah variabel independen. Sehingga dalam penelitian ini dihasilkan df sebesar 223. Dengan nilai df 223 dan signifikansi 0,05 maka nilai t_{tabel} adalah 1,970659. Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan menggunakan kriteria pengujian apabila ($t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p\text{-value} < 0,05$) maka terdapat pengaruh yang kuat antara variabel independen tersebut dengan variabel dependen. Berikut merupakan hasil pengujian uji statistik t dalam penelitian ini:

Tabel 4.6

Hasil Pengujian Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.259554	0.262032	4.806869	0.0000
COWN	0.251991	0.233559	1.078918	0.2818
INOWN	0.065897	0.375184	0.175640	0.8607
BCSIZE	0.299790	0.101697	2.947885	0.0035
IND	-0.087322	0.411141	-0.212389	0.8320

Sumber: Eviews 9, data diolah oleh peneliti, 2016

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 4.6, maka dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sesuai dengan hipotesis-hipotesis yang telah dijelaskan pada bab 2. Berikut merupakan penjelasan mengenai pengujian hipotesis-hipotesis tersebut:

1) Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.6 di atas, konsentrasi kepemilikan memiliki t hitung sebesar 1,078918 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,2818. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil daripada t tabel ($1,078918 < 1,970659$) dengan nilai signifikansi ($0,2818 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi rapat komite audit.

2) Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan oleh pihak internal perusahaan berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.6 di atas, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan memiliki t hitung sebesar 0,175640 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,8607. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil daripada t tabel ($0,175640 < 1,970659$) dengan nilai signifikansi ($0,8607 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi rapat komite audit.

3) Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.6 di atas, ukuran dewan komisaris memiliki t hitung sebesar 2,947885 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0035. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel ($2,947885 > 1,970659$) dengan nilai signifikansi ($0,0035 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap frekuensi rapat komite audit.

4) Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.6 di atas, proporsi komisaris independen memiliki t hitung sebesar -0,212389 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,8320. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel ($-0,212389 > -1,970659$) dengan nilai signifikansi ($0,8320 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi rapat komite audit.

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen untuk menerangkan variabel dependen. Pengujian koefisien determinasi (R^2) dilakukan dengan menggunakan *Adjusted R-Squared* pada persamaan regresi. *Adjusted R-Squared* mencerminkan seberapa besar perubahan variabel dependen yang dapat ditentukan oleh perubahan variabel-variabel independen. Nilai koefisien determinasi (R^2), semakin tinggi (mendekati satu) berarti semakin kuat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Adapun hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) yang tunjukkan pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.042543	Mean dependent var	1.782347
Adjusted R-squared	0.025369	S.D. dependent var	0.626314
S.E. of regression	0.618319	Akaike info criterion	1.898060
Sum squared resid	85.25689	Schwarz criterion	1.973265
Log likelihood	-211.3788	Hannan-Quinn criter.	1.928403
F-statistic	2.477171	Durbin-Watson stat	1.907056
Prob(F-statistic)	0.045079		

Sumber: Eviews 9, data diolah oleh peneliti, 2016

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 4.7, diketahui bahwa hasil *adjusted R²* dari variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 0,025369 atau 2,5369%. Hal tersebut

menunjukkan bahwa keempat variabel independen dalam penelitian ini yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen mampu menjelaskan variabel dependen yaitu frekuensi rapat komite audit sebesar 2,5369%. Sedangkan 97,4631% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya diluar model regresi. Variabel tersebut antara lain karakteristik keuangan perusahaan, kualitas audit, ukuran komite audit, keahlian anggota komite audit, dan sebagainya.

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi yang ada. Pengujian signifikansi simultan (Uji F) dilakukan dengan menggunakan kriteria Perbandingan F-statistik (F_{hitung}) dengan F_{tabel} dan juga berdasarkan probabilitas (ρ). Dalam penelitian ini, df_1 ($k-1$) yang dihasilkan sebesar 4 ($5-1$) dan df_2 ($n-k$) yang dihasilkan 223($228-5$) dimana n sebesar 228 adalah jumlah observasi dan $k = 5$ adalah jumlah variabel dependen dan independen. Dengan nilai df_1 4 dan df_2 223 dengan signifikansi 0,05, maka nilai F_{tabel} adalah 2,41. Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi, dengan menggunakan kriteria pengujian apabila ($F_{hitung} > F_{tabel}$) atau ($p\text{-value} < 0,05$) maka variabel independen berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Adapun hasil pengujian

uji signifikasni simultan (Uji F) yang ditunjukkan pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji Statistik F

R-squared	0.042543	Mean dependent var	1.782347
Adjusted R-squared	0.025369	S.D. dependent var	0.626314
S.E. of regression	0.618319	Akaike info criterion	1.898060
Sum squared resid	85.25689	Schwarz criterion	1.973265
Log likelihood	-211.3788	Hannan-Quinn criter.	1.928403
F-statistic	2.477171	Durbin-Watson stat	1.907056
Prob(F-statistic)	0.045079		

Sumber: Eviews 9, data diolah oleh peneliti, 2016

Berdasarkan hasil uji statistik F, diperoleh nilai probabilitas F sebesar 0,045079(<0,05). Selain itu dengan perbandingan nilai t tabel dan t hitung, yaitu terlihat bahwa t hitung > t tabel (2,477171 > 2,41). Dengan demikian, hasil uji statistik F ini menunjukkan bahwa koefisien regresi konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Frekuensi Rapat Komite Audit

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Berdasarkan hasil pengujian antara konsentrasi kepemilikan dengan frekuensi rapat komite audit, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel

konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi rapat komite audit. Hal ini dibuktikan pada tabel 4.6, yang ditemukan bahwa hasil uji statistik t memiliki nilai t hitung lebih kecil dibandingkan dengan t tabel, sedangkan pada uji signifikansi konstanta dan variabel independen, diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari nilai signifikansi level (α). Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit **ditolak**. Tidak adanya pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap frekuensi rapat komite audit diduga karena konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan menggunakan hak kontrol yang mereka miliki untuk menghambat aktivitas komite audit dalam melaksanakan peran komite audit sebagai pengawas, sehingga kurang memiliki pengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit yang dilakukan oleh komite audit.

Hasil penelitian ini juga mendukung bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi di dalam perusahaan mengarah kepada konflik kepentingan antara pemegang saham besar dan pemegang saham kecil, hal tersebut sesuai dengan pendapat Yin *et.al.* (2011) dalam penelitiannya yang mengemukakan bahwa konsentrasi kepemilikan pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham tunggal yang menguasai lebih dari setengah dari saham yang beredar pada perusahaan atau, kadang-kadang, dari kelompok kecil pemegang saham yang secara kolektif mengontrol lebih dari setengah saham yang beredar pada perusahaan, dan karena itu mengontrol semua aspek penting dalam menjalankan perusahaan seperti

penunjukkan direksi. Hal tersebut yang dapat mendorong konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Besarnya konsentrasi kepemilikan yang ada di dalam perusahaan juga tidak mempengaruhi jumlah rapat yang dilaksanakan oleh komite audit perusahaan. Hal ini terjadi pada PT Tanah Laut Tbk, perusahaan tersebut memiliki konsentrasi kepemilikan saham yang melebihi setengah saham beredar pada perusahaan yaitu sebesar 62,26%, akan tetapi frekuensi rapat yang diadakan selama satu tahun hanya 1 kali. Sedangkan pada PT Bina Buaya Raya Tbk, yang memiliki konsentrasi kepemilikan sebesar 34,80% melakukan frekuensi rapat komite audit sebanyak 7 kali dalam satu tahun. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yin *et. al.* (2011) dan Greco (2011) yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Salah satu alasannya karena besar dan kecilnya konsentrasi kepemilikan tidak dapat menggambarkan banyaknya frekuensi rapat komite audit yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mendez & Garcia (2007) yang menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan yang besar berpengaruh negatif signifikan terhadap frekuensi rapat komite audit. Menunjukkan bahwa kehadiran pemegang saham yang besar tidak memiliki pengaruh positif pada peran pengawasan komite audit.

Melainkan menjadi salah satu efek substitusi bagi komite audit sebagai pengawas, sehingga mengurangi frekuensi rapat komite audit.

2. Pengaruh Kepemilikan Oleh Pihak Internal Perusahaan Terhadap Frekuensi Rapat Komite Audit

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini adalah kepemilikan oleh pihak internal perusahaan berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Berdasarkan hasil pengujian antara kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dengan frekuensi rapat komite audit, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kepemilikan oleh pihak internal perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap frekuensi rapat komite audit. Hal ini dibuktikan pada tabel 4.6, yang ditemukan bahwa hasil uji statistik t memiliki nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel, sedangkan pada uji signifikansi konstanta dan variabel independen, diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari nilai signifikansi level (α). Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kepemilikan oleh pihak internal perusahaan berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit **ditolak**. Hal ini diduga karena kepemilikan oleh pihak internal perusahaan tidak dapat menggantikan *monitoring* atau pengawasan komite audit. Semakin besar kepemilikan pihak internal tidak menjamin pengawasan terhadap perusahaan akan semakin ketat. Demikian pula tidak dapat meningkatkan frekuensi rapat komite audit seiring dengan meningkatnya kepemilikan oleh pihak internal perusahaan. Besarnya

kepemilikan oleh pihak internal yang seharusnya dapat membantu pengawasan tidak terbukti di dalam penelitian ini. Kepemilikan pihak internal tidak mampu mempengaruhi untuk meningkatkan frekuensi rapat komite audit yang dilaksanakan perusahaan, sehingga kurang memiliki pengaruh terhadap frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit perusahaan.

Hasil penelitian ini berseberangan dengan pernyataan bahwa kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat menyelaraskan manajemen dan kepentingan pemegang saham perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mendez dan Garcia (2007) dalam penelitiannya yang mengemukakan bahwa kecenderungan kepemilikan pihak internal perusahaan yang memiliki saham di atas 30 persen dapat dilihat sebagai manifestasi dari manajerial. Hal tersebut menimbulkan efek ketidakselarasan yang tinggi antara manajemen dan pemegang saham perusahaan. sehingga kecenderungan manajer untuk menghindari kontrol komite audit.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mendez dan Garcia (2007) yang menyatakan bahwa kepemilikan oleh pihak internal perusahaan tidak ditemukan secara signifikan berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Salah satu alasannya karena besarnya kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat memanfaatkan keterbatasan dari komite audit perusahaan mereka. Sehingga kepemilikan oleh pihak internal perusahaan memanfaatkannya untuk mengurangi

kontrol internal perusahaan yang mengakibatkan tidak mempengaruhi frekuensi rapat komite audit.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo *et. al.* (2010), Greco (2011), dan Sharma *et. al.* (2009). Pada penelitian Sutaryo *et. al.* (2010) dan Sharma *et. al.* (2009) menemukan terdapat pengaruh positif antara kepemilikan oleh pihak internal perusahaan terhadap frekuensi rapat komite audit, yang menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan oleh pihak internal perusahaan akan meningkatkan frekuensi rapat komite audit. Sebaliknya pada penelitian Greco (2011) yang menemukan bahwa kepemilikan oleh pihak internal perusahaan berpengaruh negatif signifikan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dan komposisi dewan adalah dua variabel kunci dalam menentukan tingkat aktivitas direksi. Sejalan dengan pandangan bahwa kepemilikan oleh pihak internal perusahaan menjadi pengganti mekanisme kontrol pengawasan.

3. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Frekuensi Rapat Komite Audit

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Berdasarkan hasil pengujian antara ukuran dewan komisaris dengan frekuensi rapat komite audit, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap frekuensi rapat

komite audit. Hal ini dibuktikan pada tabel 4.6, yang ditemukan bahwa hasil uji statistik t memiliki nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel, sedangkan pada uji signifikansi konstanta dan variabel independen, diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi level (α). Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit **diterima**. Hasil ini memberikan pemahaman bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris pada perusahaan maka akan semakin tinggi frekuensi rapat komite audit.

Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan memberikan akses ke sumber daya yang lebih besar dan bakat manajerial yang lebih tinggi. Dengan hal tersebut maka akan semakin banyak pandangan dari berbagai anggota dewan komisaris untuk dapat memberikan pemantauan yang lebih efektif. Wujud dari pemantauan tersebut yaitu dilaksanakannya rapat komite audit. Oleh karena itu, dengan semakin besarnya ukuran dewan komisaris maka akan meningkatkan frekuensi rapat komite audit yang dilaksanakan perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adelopo *et. al.* (2011) yang menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Meskipun hasil dalam penelitian ini tidak signifikan akan tetapi tetap dapat mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Hasil penelitian tersebut

mendapatkan bahwa ukuran dewan komisaris yang besar akan lebih intens dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan.

Sedangkan hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Greco (2011), Sutaryo et. al. (2010), Yin et. al. (2011), dan Sharma et. al. (2009) yang mengemukakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme komite audit dan dewan komisaris dalam good corporate governance oleh perusahaan terbatas pada pemenuhan formalitas regulasi yang ada, sehingga keberadaan dan karakteristik komite audit dan dewan komisaris perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja dan nilai perusahaan.

4. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Frekuensi Rapat Komite Audit

Hipotesis terakhir atau keempat (H4) dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Berdasarkan hasil pengujian antara proporsi komisaris independen dengan frekuensi rapat komite audit, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi rapat komite audit. Hal ini dibuktikan pada tabel 4.6, yang ditemukan bahwa hasil uji statistik t memiliki nilai t hitung lebih kecil dibandingkan dengan t tabel, sedangkan pada uji signifikansi konstanta dan variabel independen, diperoleh nilai

signifikansi lebih besar dari nilai signifikansi level (α). Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit **ditolak**.

Hal ini diduga karena proporsi komisaris independen yang tinggi tidak menjamin frekuensi rapat komite audit yang dilaksanakan perusahaan juga akan meningkat. Seperti pada PT Tanah Laut Tbk yang memiliki proporsi komisaris independen sebesar 0,5 persen, hanya melaksanakan frekuensi rapat komite audit sebanyak 1 kali. Sedangkan PT MNC Sky Vision Tbk yang mempunyai proporsi komisaris independen sebesar 0,167 persen mengadakan frekuensi rapat komite audit sebanyak 4 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar atau kecilnya proporsi komisaris independen tidak mempengaruhi frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh komite audit pada perusahaan.

Hasil penelitian ini juga tidak mendukung pernyataan bahwa proporsi komisaris independen akan menuntut pengawasan internal yang lebih besar atas proses pelaporan keuangan untuk melindungi reputasi para komisaris independen, sehingga mengakibatkan frekuensi rapat komite audit meningkat. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pendapat Sharma *et. al.* (2009) yang menyatakan bahwa untuk menjaga status independennya, komisaris independen akan mengurangi frekuensi rapat komite audit. Hal tersebut dilakukan komisaris independen dengan alasan untuk mengurangi bernegoisasi agar tidak terpengaruh dan tetap objektif dalam mengambil keputusan.

Mekanisme *Good Corporate Governance* yang diterapkan di Italia dan Inggris menganut sistem *corporate governance* anglo-saxon yang memungkinkan terjadinya CEO *duality* sehingga dibutuhkan peran dari komisaris independen, sedangkan di Indonesia mekanisme *Good Corporate Governance* nya berbeda. Karena di Indonesia tidak ada CEO *duality*. Menurut pendapat Sutaryo *et. al.* (2010) pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap operasional perusahaan dalam mekanisme *Good Corporate Governance* hanya untuk pemenuhan formalitas peraturan saja. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sharma *et. al.* (2009) dan Sutaryo *et. al.* (2010) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Greco (2011) dan Adelopo *et. al.* (2012) yang menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap frekuensi rapat komite audit. Menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen akan meningkatkan frekuensi rapat komite audit. Sedangkan Yin *et. al.* (2011) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap frekuensi rapat komite audit, yang menunjukkan semakin tinggi proporsi komisaris independen akan mengurangi frekuensi rapat komite audit.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Objek penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang menerbitkan laporan tahunan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan tahunan yang telah dipublikasikan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Dalam teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Maka didapatkan 228 perusahaan non keuangan pada tahun 2014 yang memenuhi kriteria. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan masalah serta tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah:

1. Konsentrasi kepemilikan dengan menggunakan proksi persentase konsentrasi kepemilikan, ditemukan tidak mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Artinya konsentrasi kepemilikan tidak mempengaruhi frekuensi rapat komite audit karena mereka akan menggunakan hak kontrol sebagai penghambat peran komite audit.
2. Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dengan menggunakan proksi persentase kepemilikan oleh dewan komisaris dan dewan direksi, ditemukan tidak mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Artinya kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan

direksi tidak dapat menggantikan pengawasan yang dilakukan oleh komite audit, sehingga tidak mempengaruhi frekuensi rapat komite audit pada perusahaan non keuangan.

3. Ukuran dewan komisaris dengan menggunakan proksi jumlah anggota dewan komisaris, ditemukan mempengaruhi frekuensi rapat komite audit secara positif dan signifikan. Artinya semakin besar ukuran dewan komisaris maka akan semakin tinggi frekuensi rapat komite audit perusahaan.
4. Proporsi komisaris independen dengan menggunakan proksi jumlah komisaris independen per jumlah dewan komisaris, ditemukan tidak berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Artinya proporsi komisaris independen yang besar tidak menjamin frekuensi rapat komite audit akan meningkat.

B. Implikasi

Penelitian ini memiliki hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Sedangkan konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Implikasi pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Konsentrasi kepemilikan terbukti tidak berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Para pemegang konsentrasi kepemilikan perusahaan dapat lebih bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja perusahaan

dan dapat lebih mengendalikan tindakan-tindakan manajerial yang menyimpang.

2. Kepemilikan oleh pihak internal terbukti tidak berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Dewan direksi dan dewan komisaris diharuskan untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan dengan adanya kepemilikan saham yang dimiliki. Sehingga secara bersama dapat meningkatkan kualitas perusahaan.
3. Ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap frekuensi rapat komite audit, sehingga semakin besar ukuran dewan komisaris maka akan semakin tinggi frekuensi rapat komite audit. Perusahaan dapat menyeimbangkan ukuran dewan komisaris perusahaan untuk dapat mempertahankan efektivitas komite audit dalam memenuhi tata kelola perusahaan yang baik.
4. Proporsi komisaris independen terbukti tidak berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Komisaris independen dituntut untuk tetap menjaga dan meningkatkan kemampuannya dalam independensi pengawasan terhadap manajemen.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran guna menyempurnakan penelitian selanjutnya. Saran-saran tersebut adalah:

1. Peraturan yang ada terkait standar isi laporan tahunan harus lebih dikedatkan pelaksanaannya, agar perusahaan secara konsisten terus mengikuti standar yang ada dalam membuat laporan tahunan perusahaan;
2. Pembuat kebijakan disarankan untuk mengeluarkan peraturan frekuensi rapat komite audit mengenai jumlah eksplisit yang harus dilaksanakan oleh perusahaan;
3. Perusahaan yang terdaftar di BEI diharapkan dapat mencantumkan dan melaksanakan jumlah frekuensi rapat komite audit di dalam laporan tahunan, mengingat sebagai salah satu tolak ukur untuk tata kelola perusahaan yang baik.
4. Berdasarkan hasil *adjusted* R^2 dari variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 0,025369 atau 2,5369%. Hal ini berarti bahwa 2,5369% dari frekuensi rapat komite audit dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen dalam penelitian ini yakni konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen. Berarti sebesar 97,4631% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya diluar model regresi. Jadi, diharapkan penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel variabel yang lain yang signifikan berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit seperti karakteristik keuangan perusahaan, kualitas audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelopo, I., Jallow, K., & Scott, P. (2012). Determinants of Audit Committees' Activity: Evidence from The UK. *Social Responsibility Journal*, 471-483.
- Amin, A. R., & TIM PEBS FE UI . (2010). *Menggagas Manajemen Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bryan, D., Tiras, S. L., & Liu, M. C. (2004). The Influence Of Independent and Effective Audit Committees On Earnings Quality.
- Bursa Efek Indonesia. (t.thn.). *www.idx.co.id*.
- Gantjowati, E., & Nugraheni, R. L. (2014). The Impact of Financial Distress Status and Corporate Governance Structures on the Level of Voluntary Disclosure Within Annual Reports of Firms (Case Study of Non-financial Firms in Indonesia Over the Period of 2009-2011). *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 389-403.
- Greco, G. (2011). Determinants of Board and Audit Committee Meeting Frequency. *Managerial Auditing Journal*, 208-229.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep. 00001/BEI/01-2014. (t.thn.).
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012. (t.thn.).
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2002). Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.
- Lins, K. V., & Warnock, F. E. (2004). Corporate Governance and the Shareholder Base .
- Mendez, C. F., & Garcia, R. A. (2007). The Effects of Ownership Structure and Board Composition on the Audit Committee Meeting Frequency: Spanish Evidence. 909-920.
- Nuryaman. (2009). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 89-116.

- PWC. Diambil kembali dari <http://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/consulting/forensics/economic-crime-survey.html>
- Raghunandan, K., & Rama, D. V. (2007). Determinants of Audit Committee Diligence. *Accounting Horizons*, 265-279.
- Rahmat, M. M., Iskandar, T. M., & Saleh, N. M. (2009). Audit Committee Characteristics in Financially Distressed and Non-Distressed Companies. *Managerial Auditing Journal*, 624-638.
- Restria, & Cahyonowati. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Pengawasan Dewan Komisaris Pada Perusahaan Go Public di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-11.
- Riyanto, A. (2016, Maret 4). Diambil kembali dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/03/04/komite-audit-sebagai-pengawas-internal-emiten-di-pasar-modal>
- Rustiarini, N. W., & Sugiarti, N. W. (2013). Pengaruh Karakteristik Auditor, Opini Audit, Audit Tenure, Pergantian Auditor Pada Audit Delay. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 657-675.
- Sharma, V., Naiker, V., & Barry, L. (2009). Determinants of Audit Committee Meeting Frequency: Evidence from a Voluntary Governance System. *Accounting Horizon*, 245-263.
- Sugiyono, P. (2011). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sutaryo, Payamta, & Bandi. (2010). Penentu Frekuensi Rapat Komite Audit: Bukti Pelaksanaan Good Corporate Governance di Indonesia .
- Tim Penyusun. (2012). *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UNJ.
- Winarno, W. (2009). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Yin, F., Gao, S., Li, W., & Lv, H. (2012). Determinants of Audit Committee Meeting Frequency: Evidence from Chinese Listed Companies. *Managerial Auditing Journal*, 425-444.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kartu Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung B, Jalan Pajadiran, Blok A, Jakarta D 2206
Telepon (021) 42774700-85, Fax (021) 470058
Laman web: uni.ja.ac.id



Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung B, Jalan Pajadiran, Blok A, Jakarta D 2206
Telepon (021) 42774700-85, Fax (021) 470058
Laman web: uni.ja.ac.id

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

HEDYAN, SABILA, GHAISSANI
8335 133 520

SI A KUNTANSI
ETTY GUREND PAKATINIP, 19680314 199203 2 002
NUNIKA MURDAYANTINIP, 19780621 200801 2 011

6. Judul Skripsi: **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Frekuensi Rapat Komite Audit**

NO	JELASANTAN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING
1	28 JANUARI 2016	PENGARJUAN JUDUL BAB I	HUBUNGAN ANTARA X DENGAN Y
2	10 FEBRUARI 2016	PENGARJUAN JUDUL BARU	
3	8 MARET 2016	BAB I	
4	15 MARET 2016	BAB II	
5	15 APRIL 2016	BAB III	
6	19 APRIL 2016	BAB IV	
7	9 MEI 2016	BAB V	
8	9 MEI 2016	BAB VI	
9	9 MEI 2016	BAB VII	
10	11 MEI 2016	REVISI	
11	21 JULI 2016	BAB VIII	
12			
13			
14			

1. Nama Mahasiswa

2. No. Registrasi

3. Program Studi

4. Dosen Pembimbing I

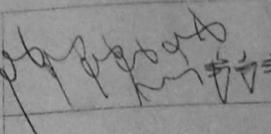
5. Dosen Pembimbing II

1. Nama

2. Nomor dan tanggal dan ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi

3. Nomor dan tanggal pada saat ujian skripsi, apabila diperlukan dapat digambarkan sebagai bukti pembimbingan

TANDA TANGAN

DPJ: 

SETUJULUNTIK UJIAN SKRIPSI 

Lampiran 2: Perusahaan Sampel Penelitian

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	ANJT
2	PT Eagle High Plantations Tbk	BWPT
3	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	DSNG
4	PT Gozco Plantations Tbk	GZCO
5	PT Jaya Agra Wattie Tbk	JAWA
6	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	LSIP
7	PT Provident Agro Tbk	PALM
8	PT Salim Ivomas Pratama Tbk	SIMP
9	PT Smart Tbk	SMAR
10	PT Tunas Baru Lampung Tbk	TBLA
11	PT Central Proteina Prima Tbk	CPRO
12	PT Dharma Samudera Fishing Ind Tbk	DSFI
13	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	BTEK
14	PT Adaro Energy Tbk	ADRO
15	PT Atlas Resources Tbk	ARII
16	PT Bara Jaya Internasional Tbk	ATPK
17	PT Bayan Resources Tbk	BYAN
18	PT Garda Tujuh Buana Tbk	GTBO
19	PT Harum Energy Tbk	HRUM
20	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG
21	PT Resource Alam Indonesia Tbk	KKGI
22	PT Samido Resources Tbk	MYOH
23	PT Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK
24	PT Golden Eagle Energy Tbk	SMMT
25	PT Toba Bara Sejahtera Tbk	TOBA
26	PT Ratu Prabu Energi Tbk	ARTI
27	PT Elnusa Tbk	ELSA
28	PT Energi Mega Persada Tbk	ENRG
29	PT Medco Energi Internasional Tbk	MEDC
30	PT Radiant Utama Interinsco Tbk	RUIS
31	PT Central Omega Resources Tbk	DKFT
32	PT Timah (Persero) Tbk	TINS
33	PT Citatah Tbk	CTTH
34	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR
35	PT Wijaya Karya Beton Tbk	WTON
36	PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	INTP

37	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR
38	PT Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG
39	PT Keramik Indonesia Assosiasi Tbk	KIAS
40	PT Mulia Industrindo Tbk	MLIA
41	PT Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO
42	PT Alakasa Industrindo Tbk	ALKA
43	PT Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI
44	PT Bentonjaya Manunggal Tbk	BTON
45	PT Citra Tubindo Tbk	CTBN
46	PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk	GDST
47	PT Indal Aluminium Industry Tbk	INAI
48	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS
49	PT Lion Metal Works Tbk	LION
50	PT Lionmesh Prima Tbk	LMSH
51	PT Latinusa Tbk	NIKL
52	PT Jaya Pari Steel Tbk	JPRS
53	PT Indo Acidatama Tbk	SRSN
54	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS
55	PT Eterindo Wahanatama Tbk	ETWA
56	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	TPIA
57	PT Unggul Indah Cahaya Tbk	UNIC
58	PT Argha Karya Prima Ind. Tbk	AKPI
59	PT Berlina Tbk	BRNA
60	PT Lotte Chemical Titan Tbk	FPNI
61	PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk	IPOL
62	PT Trias Sentosa Tbk	TRST
63	PT Yanaprima Hastapersada Tbk	YPAS
64	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN
65	PT Sierad Produce Tbk	SIPD
66	PT SLJ Global Tbk	SULI
67	PT Alkindo Naratama Tbk	ALDO
68	PT Fajar Surya Wisesa Tbk	FASW
69	PT Toba Pulp Lestari Tbk	INRU
70	PT Grand Kartech Tbk	KRAH
71	PT Astra International Tbk	ASII
72	PT Astra Otoparts Tbk	AUTO
73	PT Indo Kordsa Tbk	BRAM
74	PT Gajah Tunggal Tbk	GJTL
75	PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	IMAS
76	PT Indospring Tbk	INDS
77	PT Multistrada Arah Sarana Tbk	MASA
78	PT Prima Alloy Steel Universal Tbk	PRAS
79	PT Selamat Sempurna Tbk	SMSM
80	PT Eratex Djaja Tbk	ERTX

81	PT Panasia Indo Resources Tbk	HDTX
82	PT Indorama Synthetics Tbk	INDR
83	PT Sri Rejeki Isman Tbk	SRIL
84	PT Sunson Textile Manufacturer Tbk	SSTM
85	PT Tifico Fiber Indonesia Tbk	TFCO
86	PT Sepatu Bata Tbk	BATA
87	PT Sumi Indo Kabel Tbk	IKBI
88	PT Kabelindo Murni Tbk	KBLM
89	PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk	SCCO
90	PT Sat Nusapersada Tbk	PTSN
91	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	AISA
92	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
93	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
94	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI
95	PT Mayora Indah Tbk	MYOR
96	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI
97	PT Sekar Bumi Tbk	SKBM
98	PT Sekar Laut Tbk	SKLT
99	PT Siantar Top Tbk	STTP
100	PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ
101	PT Gudang Garam Tbk	GGRM
102	PT Bentoel International Investama Tbk	RMBA
103	PT Kalbe Farma Tbk	KLBF
104	PT Martina Berto Tbk	MBTO
105	PT Mandom Indonesia Tbk	TCID
106	PT Unilever Indonesia Tbk	UNVR
107	PT Kedaung Indah Can Tbk	KICI
108	PT Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI
109	PT Agung Podomoro Land Tbk	APLN
110	PT Bekasi Asri Pemula Tbk	BAPA
111	PT Bekasi Fajar Industri Estate Tbk	BEST
112	PT Bukit Darmo Property Tbk	BKDP
113	PT Cowell Development Tbk	COWL
114	PT Ciputra Development Tbk	CTRA
115	PT Ciputra Property Tbk	CTRP
116	PT Ciputra Surya Tbk	CTRS
117	PT Duta Anggada Realty Tbk	DART
118	PT Intiland Development Tbk	DILD
119	PT Bakrieland Development Tbk	ELTY
120	PT Megapolitan Developments Tbk	EMDE
121	PT Greenwood Sejahtera Tbk	GWSA
122	PT Lamicitra Nusantara Tbk	LAMI
123	PT Eureka Prima Jakarta Tbk.	LCCP

124	PT Lippo Cikarang Tbk	LPCK
125	PT Modernland Realty Tbk	MDLN
126	PT Metropolitan Kentjana Tbk	MKPI
127	PT Metropolitan Land Tbk	MTLA
128	PT Pudjiadi Prestige Tbk	PUDP
129	PT Pakuwon Jati Tbk	PWON
130	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	RBMS
131	PT Roda Vivatex Tbk	RDTX
132	PT Pikko Land Development Tbk	RODA
133	PT Summarecon Agung Tbk	SMRA
134	PT Sitara Propertindo Tbk	TARA
135	PT Acset Indonusa Tbk	ACST
136	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	ADHI
137	PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk	DGIK
138	PT Nusa Raya Cipta Tbk	NRCA
139	PT Total Bangun Persada Tbk	TOTL
140	PT Wijaya Karya Tbk	WIKA
141	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	WSKT
142	PT Samudera Indonesia Tbk	SMDR
143	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	PGAS
144	PT Rukun Raharja Tbk	RAJA
145	PT Jasa Marga Tbk	JSMR
146	PT Nusantara Infrastructure Tbk	META
147	PT XL Axiata Tbk	EXCL
148	PT Smartfren Telecom Tbk	FREN
149	PT Indosat Tbk	ISAT
150	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	TLKM
151	PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk.	CPGT
152	PT Tanah Laut Tbk	INDX
153	PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk	APOL
154	PT Adi Sarana Armada Tbk	ASSA
155	PT Bina Buaya Raya Tbk	BBRM
156	PT Blue Bird Tbk	BIRD
157	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	GIAA
158	PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk	IATA
159	PT Logindo Samudramakmur Tbk.	LEAD
160	PT Mitrahaftera Segara Sejati Tbk	MBSS
161	PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk	NELY
162	PT Steady Safe Tbk	SAFE
163	PT Sidomulyo Selaras Tbk	SDMU
164	PT Samudera Indonesia Tbk	SMDR

165	PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk	TMAS
166	PT Trada Maritime Tbk	TRAM
167	PT Wintermar Offshore Marine Tbk	WINS
168	PT Bali Towerindo Sentra Tbk.	BALI
169	PT Indika Energy Tbk	INDY
170	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	TBIG
171	PT Sarana Menara Nusantara Tbk	TOWR
172	PT Arita Prima Indonesia Tbk.	APII
173	PT Perdana Bangun Pusaka Tbk	KONI
174	PT Multi Indocitra Tbk	MICE
175	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	MPMX
176	PT Akbar Indomakmur Stimec Tbk	AIMS
177	PT AKR Corporindo Tbk	AKRA
178	PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk	BMSR
179	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	DSSA
180	PT FKS Multi Agro Tbk	FISH
181	PT Evergreen Invesco Tbk	GREN
182	PT Hexindo Adiperkasa Tbk	HEXA
183	PT Intraco Penta Tbk	INTA
184	PT Inter-Delta Tbk	INTD
185	PT Modern Internasional Tbk	MDRN
186	PT Ancora Indonesia Resources Tbk	OKAS
187	PT Tira Austenite Tbk	TIRA
188	PT Wicaksana Overseas International Tbk	WICO
189	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	CSAP
190	PT Electronic City Indonesia Tbk.	ECII
191	PT Erajaya Swasembada Tbk	ERAA
192	PT Global Teleshop Tbk	GLOB
193	PT Midi Utama Indonesia Tbk	MIDI
194	PT Matahari Putra Prima Tbk	MPPA
195	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	RALS
196	PT Supra Boga Lestari Tbk	RANC
197	PT Sona Topas Tourism Industry Tbk	SONA
198	PT Trikonsel Oke Tbk	TRIO
199	PT Hotel Mandarin Regency Tbk	HOME
200	PT Saraswati Griya Lestari Tbk	HOTL
201	PT Island Concepts Indonesia Tbk	ICON
202	PT Indonesian Paradise Property Tbk	INPP
203	PT Jakarta International Hotels & Development Tbk	JIHD

204	PT MNC Land Tbk	KPIG
205	PT Panorama Sentrawisata Tbk	PANR
206	PT Pembangunan Graha Lestari Tbk	PGLI
207	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	PJAA
208	PT Pudjiadi & Sons Tbk	PNSE
209	PT Red Planet Indonesia Tbk	PSKT
210	PT Hotel Sahid Jaya Tbk	SHID
211	PT Graha Layar Prima Tbk	BLTZ
212	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	EMTK
213	PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk	JTPE
214	PT Intermedia Capital Tbk.	MDIA
215	PT Media Nusantara Citra Tbk	MNCN
216	PT MNC Sky Vision Tbk	MSKY
217	PT Surya Citra Media Tbk	SCMA
218	PT Astra Graphia Tbk	ASGR
219	PT ABM Investama Tbk	ABMM
220	PT MNC Investama Tbk	BHIT
221	PT Global Mediacom Tbk	BMTR
222	PT Bakrie & Brothers Tbk	BNBR
223	PT Hanson International Tbk	MYRX
224	PT Pool Advista Indonesia Tbk	POOL
225	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	SRTG
226	PT Apexindo Pratama Duta Tbk	APEX
227	PT Dyandra Media International Tbk.	DYAN
228	PT Gema Grahasarana Tbk	GEMA

**Lampiran 3: Ringkasan Perhitungan Variabel Independen dan Variabel
Dependen**

Kode Perusahaan	ACMEET	COWN	INOWN	BCSIZE	IND
ANJT	1.386	0.403	0.094	2.079	0.500
BWPT	1.609	0.655	0.000	1.609	0.400
DSNG	1.609	0.341	0.107	1.792	0.330
GZCO	2.079	0.317	0.058	1.386	0.500
JAWA	1.609	0.705	0.005	1.099	0.333
LSIP	1.386	0.595	0.000	2.079	0.375
PALM	1.946	0.442	0.001	1.792	0.500
SIMP	2.197	0.735	0.000	1.792	0.333
SMAR	2.398	0.972	0.000	2.079	0.500
TBLA	1.386	0.278	0.008	1.099	0.333
CPRO	2.485	0.514	0.000	1.099	0.667
DSFI	2.079	0.296	0.001	0.693	0.500
BTEK	1.792	0.579	0.000	1.099	0.333
ADRO	3.178	0.439	0.151	1.609	0.400
ARII	1.386	0.507	0.218	1.792	0.333
ATPK	1.386	0.827	0.008	1.099	0.333
BYAN	2.079	0.516	0.650	1.609	0.400
GTBO	1.386	0.337	0.000	1.099	0.333
HRUM	1.609	0.706	0.000	1.609	0.400
ITMG	2.485	0.651	0.000	1.792	0.333
KKGI	1.609	0.348	0.003	1.609	0.400
MYOH	1.609	0.591	0.000	1.099	0.333
PKPK	1.099	0.540	0.400	1.099	0.333
SMMT	1.386	0.297	0.000	1.609	0.600
TOBA	2.197	0.718	0.000	1.099	0.667
ARTI	1.609	0.814	0.016	0.693	0.500
ELSA	2.773	0.411	0.000	1.609	0.400
ENRG	1.386	0.588	0.000	1.386	0.500
MEDC	1.609	0.507	0.000	1.792	0.333
RUIS	2.485	0.329	0.000	1.099	0.333
DKFT	1.792	0.752	0.000	1.099	0.333
TINS	3.829	0.660	0.000	1.609	0.400
CTTH	1.792	0.412	0.066	1.099	0.333
SMGR	3.258	0.510	0.000	1.946	0.286

WTON	1.386	0.600	0.000	1.792	0.333
INTP	1.386	0.510	0.000	1.946	0.429
SMBR	1.386	0.762	0.000	1.609	0.600
AMFG	2.639	0.439	0.000	1.792	0.333
KIAS	1.792	0.963	0.000	1.792	0.333
MLIA	2.485	0.430	0.001	1.609	0.400
TOTO	2.639	0.395	0.000	1.609	0.400
ALKA	1.386	0.330	0.001	1.386	0.500
ALMI	1.386	0.371	0.016	1.386	0.500
BTON	1.609	0.456	0.096	0.693	0.500
CTBN	1.386	0.420	0.000	1.792	0.333
GDST	1.609	0.514	0.000	1.099	0.333
INAI	1.386	0.330	0.002	1.386	0.500
KRAS	3.045	0.800	0.000	1.609	0.400
LION	1.099	0.289	0.002	1.099	0.333
LMSH	1.386	0.426	0.252	1.099	0.333
NIKL	1.946	0.350	0.000	1.792	0.333
JPRS	2.485	0.367	0.155	0.693	0.500
SRSN	1.792	0.350	0.116	2.079	0.375
DPNS	1.386	0.512	0.057	1.099	0.333
ETWA	1.386	0.443	0.001	1.386	0.250
TPIA	2.485	0.554	0.001	1.946	0.286
UNIC	1.792	0.473	0.000	1.792	0.333
AKPI	1.099	0.349	0.000	1.609	0.400
BRNA	1.386	0.510	0.000	1.946	0.429
FPNI	1.386	0.952	0.000	0.693	0.500
IPOL	1.609	0.410	0.000	1.099	0.333
TRST	1.792	0.391	0.012	1.386	0.500
YPAS	1.386	0.895	0.004	1.099	0.333
CPIN	3.466	0.555	0.000	1.792	0.333
SIPD	1.386	0.588	0.000	1.099	0.667
SULI	2.485	0.262	0.010	1.099	0.333
ALDO	1.792	0.584	0.143	1.099	0.333
FASW	2.639	0.512	0.000	1.609	0.400
INRU	0.693	0.896	0.000	1.386	0.500
KRAH	1.386	0.832	0.000	1.099	0.333
ASII	1.946	0.501	0.000	2.398	0.364
AUTO	1.792	0.800	0.000	2.303	0.300
BRAM	1.609	0.602	0.278	2.565	0.308

GJTL	2.398	0.495	0.001	1.792	0.500
IMAS	1.792	0.715	0.000	1.946	0.429
INDS	1.609	0.881	0.004	1.099	0.333
MASA	1.386	0.410	0.157	1.609	0.400
PRAS	1.386	0.410	0.050	1.099	0.333
SMSM	1.386	0.611	0.005	1.099	0.333
ERTX	1.386	0.346	0.000	1.386	0.500
HDTX	2.565	0.448	0.024	1.099	0.333
INDR	1.386	0.490	0.000	1.609	0.400
SRIL	1.099	0.561	0.001	1.099	0.333
SSTM	1.386	0.410	0.081	1.792	0.333
TFCO	1.386	0.331	0.001	1.099	0.333
BATA	1.609	0.819	0.000	1.609	0.400
IKBI	1.386	0.931	0.000	1.099	0.333
KBLM	1.386	0.268	0.000	1.099	0.333
SCCO	1.386	0.327	0.059	1.099	0.333
PTSN	1.386	0.665	0.700	1.099	0.333
AISA	1.099	0.379	0.000	1.609	0.200
ICBP	1.792	0.805	0.000	1.946	0.429
INDF	2.197	0.501	0.000	2.079	0.375
MLBI	1.609	0.818	0.000	1.386	0.500
MYOR	1.609	0.671	0.000	1.609	0.400
ROTI	1.386	0.315	0.000	1.386	0.500
SKBM	1.386	0.177	0.031	1.099	0.333
SKLT	1.386	0.268	0.001	1.099	0.333
STTP	1.386	0.568	0.032	1.099	0.333
ULTJ	1.099	0.355	0.179	1.099	0.333
GGRM	1.792	0.693	0.009	1.386	0.500
RMBA	1.386	0.856	0.000	1.792	0.667
KLBF	1.386	0.433	0.000	1.792	0.333
MBTO	3.611	0.668	0.001	1.099	0.333
TCID	2.639	0.608	0.000	2.079	0.625
UNVR	1.386	0.850	0.000	1.609	0.800
KICI	1.386	0.436	0.002	1.099	0.333
LMPI	2.485	0.178	0.000	0.693	0.500
APLN	2.639	0.620	0.031	1.099	0.333
BAPA	0.693	0.339	0.001	1.099	0.333
BEST	1.946	0.480	0.001	1.609	0.400
BKDP	1.386	0.992	0.008	1.386	0.500
COWL	1.386	0.852	0.000	1.099	0.333
CTRA	1.386	0.616	0.000	1.386	0.500
CTRP	1.609	0.580	0.000	1.609	0.400
CTRS	1.386	0.627	0.000	1.099	0.333

DART	2.485	0.449	0.000	1.099	0.333
DILD	2.833	0.579	0.000	1.792	0.333
ELTY	2.398	0.756	0.000	1.609	0.400
EMDE	1.792	0.668	0.079	1.099	0.333
GWSA	1.386	0.563	0.000	0.693	0.500
LAMI	2.485	0.929	0.000	1.099	0.333
LCGP	1.386	0.300	0.001	1.386	0.250
LPCK	1.386	0.578	0.000	1.099	0.333
MDLN	2.197	0.640	0.000	1.609	0.400
MKPI	1.386	0.474	0.028	3.091	0.318
MTLA	1.386	0.375	0.004	1.792	0.333
PUDP	1.386	0.445	0.040	1.099	0.333
PWON	1.792	0.424	0.000	1.099	0.667
RBMS	3.178	0.363	0.503	1.099	0.333
RDTX	0.693	0.378	0.013	1.099	0.333
RODA	1.386	0.683	0.000	1.099	0.333
SMRA	1.386	0.621	0.003	1.386	0.500
TARA	1.386	0.600	0.000	0.693	0.500
ACST	1.099	0.385	0.008	0.693	0.500
ADHI	2.398	0.510	0.000	1.792	0.333
DGIK	1.609	0.330	0.001	1.609	0.400
NRCA	1.386	0.625	0.120	1.386	0.500
TOTL	2.303	0.565	0.018	1.792	0.333
WIKA	2.890	0.651	0.004	1.386	0.500
WSKT	3.091	0.673	0.007	1.792	0.333
SMDR	2.485	0.580	0.051	1.609	0.400
PGAS	3.784	0.570	0.000	1.792	0.333
RAJA	1.386	0.606	0.000	1.099	0.333
JSMR	2.833	0.700	0.000	1.792	0.333
META	1.946	0.476	0.000	1.099	0.667
EXCL	1.946	0.665	0.000	1.792	0.333
FREN	1.099	0.272	0.000	1.609	0.600
ISAT	1.609	0.650	0.000	2.303	0.300
TLKM	3.638	0.526	0.000	1.946	0.429
CPGT	1.609	0.440	0.003	1.946	0.429
INDX	0.000	0.623	0.000	0.693	0.500
APOL	1.099	0.760	0.000	1.099	0.333
ASSA	1.609	0.377	0.027	1.099	0.333
BBRM	1.946	0.348	0.006	1.609	0.400
BIRD	0.693	0.372	0.418	2.079	0.375
GIAA	3.434	0.605	0.000	1.792	0.333
IATA	1.792	0.324	0.000	1.792	0.333
LEAD	1.609	0.350	0.350	1.099	0.333

MBSS	1.386	0.510	0.000	1.946	0.571
NELY	2.303	0.849	0.005	1.099	0.333
SAFE	1.099	0.614	0.000	0.693	0.500
SDMU	2.303	0.522	0.672	1.099	0.333
SMDR	2.079	0.580	0.051	1.609	0.400
TMAS	2.485	0.860	0.004	1.099	0.667
TRAM	1.386	0.472	0.000	0.693	0.500
WINS	2.398	0.488	0.031	1.099	0.333
BALI	1.386	0.743	0.000	1.099	0.333
INDY	1.386	0.635	0.301	1.792	0.333
TBIG	1.609	0.447	0.012	1.609	0.600
TOWR	1.386	0.328	0.000	1.099	0.333
APII	1.609	0.580	0.020	1.099	0.333
KONI	1.386	0.642	0.056	1.099	0.333
MICE	1.792	0.487	0.000	1.099	0.333
MPMX	1.946	0.332	0.027	1.792	0.333
AIMS	2.485	0.843	0.000	1.099	0.333
AKRA	1.386	0.588	0.004	1.099	0.333
BMSR	1.386	0.710	0.000	0.693	0.500
DSSA	2.197	0.600	0.000	1.609	0.600
FISH	1.386	0.799	0.000	1.099	0.333
GREN	1.386	0.554	0.000	0.693	0.500
HEXA	1.609	0.486	0.000	1.099	0.667
INTA	1.792	0.278	0.035	1.099	0.333
INTD	1.386	0.745	0.010	1.099	0.333
MDRN	2.485	0.436	0.016	1.099	0.333
OKAS	1.946	0.520	0.000	1.099	0.667
TIRA	2.708	0.464	0.000	1.099	0.333
WICO	1.386	0.781	0.000	1.099	0.333
CSAP	1.386	0.423	0.054	1.609	0.400
ECII	1.386	0.256	0.001	1.609	0.400
ERAA	2.398	0.600	0.003	1.099	0.333
GLOB	1.386	0.867	0.000	1.099	0.333
MIDI	1.386	0.867	0.007	1.792	0.500
MPPA	1.386	0.502	0.000	1.792	0.333
RALS	1.386	0.559	0.037	1.386	0.500
RANC	1.099	0.274	0.000	1.099	0.333
SONA	1.386	0.450	0.108	1.792	0.333
TRIO	1.792	0.449	0.000	1.609	0.400
HOME	1.386	0.280	0.036	1.099	0.333

HOTL	1.386	0.654	0.021	0.693	0.500
ICON	0.693	0.423	0.034	1.099	0.333
INPP	1.386	0.370	0.008	1.386	0.500
JHHD	1.946	0.537	0.212	1.792	0.333
KPIG	1.386	0.474	0.016	1.099	0.333
PANR	1.386	0.643	0.035	1.099	0.333
PGLI	2.639	0.468	0.049	1.099	0.333
PJAA	3.871	0.720	0.000	1.386	0.500
PNSE	2.197	0.557	0.030	1.099	0.333
PSKT	1.099	0.657	0.015	1.386	0.500
SHID	2.708	0.417	0.063	1.609	0.400
BLTZ	1.099	0.482	0.000	0.693	0.500
EMTK	2.197	0.230	0.408	2.079	0.375
JTPE	1.386	0.636	0.050	0.693	0.500
MDIA	1.386	0.900	0.000	1.099	0.333
MNCN	1.386	0.669	0.001	1.609	0.400
MSKY	1.386	0.698	0.000	1.792	0.167
SCMA	2.485	0.618	0.001	1.386	0.500
ASGR	2.639	0.769	0.000	1.099	0.333
ABMM	2.197	0.550	0.001	1.099	0.333
BHIT	1.386	0.363	0.064	1.792	0.333
BMTR	1.386	0.502	0.005	1.792	0.333
BNBR	2.079	0.545	0.000	1.386	0.500
MYRX	1.792	0.670	0.090	1.386	0.500
POOL	1.792	0.820	0.000	0.693	0.500
SRTG	2.398	0.315	0.583	1.609	0.500
APEX	1.609	0.751	0.000	1.099	0.667
DYAN	1.386	0.515	0.109	1.609	0.400
GEMA	1.386	0.747	0.078	1.099	0.333

Lampiran 4: Hasil Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

Kode Perusahaan	IND		IND
	Σ Komisaris Independen	Σ Dewan Komisaris	
ANJT	4	8	0.500
BWPT	2	5	0.400
DSNG	2	6	0.333
GZCO	2	4	0.500
JAWA	1	3	0.333
LSIP	3	8	0.375
PALM	3	6	0.500
SIMP	2	6	0.333
SMAR	4	8	0.500
TBLA	1	3	0.333
CPRO	2	3	0.667
DSFI	1	2	0.500
BTEK	1	3	0.333
ADRO	2	5	0.400
ARII	2	6	0.333
ATPK	1	3	0.333
BYAN	2	5	0.400
GTBO	1	3	0.333
HRUM	2	5	0.400
ITMG	2	6	0.333
KKGI	2	5	0.400
MYOH	1	3	0.333
PKPK	1	3	0.333
SMMT	3	5	0.600
TOBA	2	3	0.667
ARTI	1	2	0.500
ELSA	2	5	0.400
ENRG	2	4	0.500
MEDC	2	6	0.333
RUIS	1	3	0.333
DKFT	1	3	0.333
TINS	2	5	0.400
CTTH	1	3	0.333
SMGR	2	7	0.286
WTON	2	6	0.333
INTP	3	7	0.429

SMBR	3	5	0.600
AMFG	2	6	0.333
KIAS	2	6	0.333
MLIA	2	5	0.400
TOTO	2	5	0.400
ALKA	2	4	0.500
ALMI	2	4	0.500
BTON	1	2	0.500
CTBN	2	6	0.333
GDST	1	3	0.333
INAI	2	4	0.500
KRAS	2	5	0.400
LION	1	3	0.333
LMSH	1	3	0.333
NIKL	2	6	0.333
JPRS	1	2	0.500
SRSN	3	8	0.375
DPNS	1	3	0.333
ETWA	1	4	0.250
TPIA	2	7	0.286
UNIC	2	6	0.333
AKPI	2	5	0.400
BRNA	3	7	0.429
FPNI	1	2	0.500
IPOL	1	3	0.333
TRST	2	4	0.500
YPAS	1	3	0.333
CPIN	2	6	0.333
SIPD	2	3	0.667
SULI	1	3	0.333
ALDO	1	3	0.333
FASW	2	5	0.400
INRU	2	4	0.500
KRAH	1	3	0.333
ASII	4	11	0.364
AUTO	3	10	0.300
BRAM	4	13	0.308
GJTL	3	6	0.500
IMAS	3	7	0.429
INDS	1	3	0.333
MASA	2	5	0.400
PRAS	1	3	0.333
SMSM	1	3	0.333
ERTX	2	4	0.500

HDTX	1	3	0.333
INDR	2	5	0.400
SRIL	1	3	0.333
SSTM	2	6	0.333
TFCO	1	3	0.333
BATA	2	5	0.400
IKBI	1	3	0.333
KBLM	1	3	0.333
SCCO	1	3	0.333
PTSN	1	3	0.333
AISA	1	5	0.200
ICBP	3	7	0.429
INDF	3	8	0.375
MLBI	2	4	0.500
MYOR	2	5	0.400
ROTI	2	4	0.500
SKBM	1	3	0.333
SKLT	1	3	0.333
STTP	1	3	0.333
ULTJ	1	3	0.333
GGRM	2	4	0.500
RMBA	4	6	0.667
KLBF	2	6	0.333
MBTO	1	3	0.333
TCID	5	8	0.625
UNVR	4	5	0.800
KICI	1	3	0.333
LMPI	1	2	0.500
APLN	1	3	0.333
BAPA	1	3	0.333
BEST	2	5	0.400
BKDP	2	4	0.500
COWL	1	3	0.333
CTRA	2	4	0.500
CTRP	2	5	0.400
CTRS	1	3	0.333
DART	1	3	0.333
DILD	2	6	0.333
ELTY	2	5	0.400
EMDE	1	3	0.333
GWSA	1	2	0.500
LAMI	1	3	0.333
LCGP	1	4	0.250

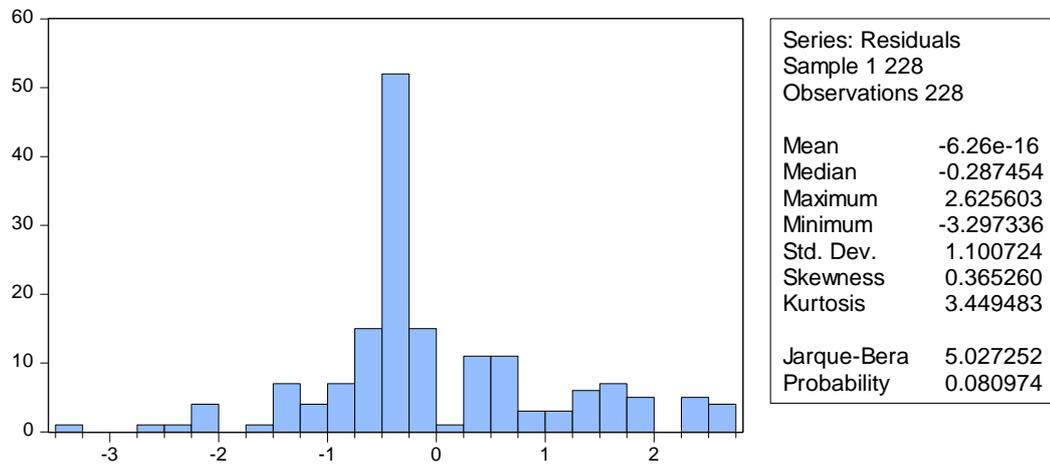
LPCK	1	3	0.333
MDLN	2	5	0.400
MKPI	7	22	0.318
MTLA	2	6	0.333
PUDP	1	3	0.333
PWON	2	3	0.667
RBMS	1	3	0.333
RDTX	1	3	0.333
RODA	1	3	0.333
SMRA	2	4	0.500
TARA	1	2	0.500
ACST	1	2	0.500
ADHI	2	6	0.333
DGIK	2	5	0.400
NRCA	2	4	0.500
TOTL	2	6	0.333
WIKA	2	4	0.500
WSKT	2	6	0.333
SMDR	2	5	0.400
PGAS	2	6	0.333
RAJA	1	3	0.333
JSMR	2	6	0.333
META	2	3	0.667
EXCL	2	6	0.333
FREN	3	5	0.600
ISAT	3	10	0.300
TLKM	3	7	0.429
CPGT	3	7	0.429
INDX	1	2	0.500
APOL	1	3	0.333
ASSA	1	3	0.333
BBRM	2	5	0.400
BIRD	3	8	0.375
GIAA	2	6	0.333
IATA	2	6	0.333
LEAD	1	3	0.333
MBSS	4	7	0.571
NELY	1	3	0.333
SAFE	1	2	0.500
SDMU	1	3	0.333
SMDR	2	5	0.400
TMAS	2	3	0.667
TRAM	1	2	0.500

WINS	1	3	0.333
BALI	1	3	0.333
INDY	2	6	0.333
TBIG	3	5	0.600
TOWR	1	3	0.333
APII	1	3	0.333
KONI	1	3	0.333
MICE	1	3	0.333
MPMX	2	6	0.333
AIMS	1	3	0.333
AKRA	1	3	0.333
BMSR	1	2	0.500
DSSA	3	5	0.600
FISH	1	3	0.333
GREN	1	2	0.500
HEXA	2	3	0.667
INTA	1	3	0.333
INTD	1	3	0.333
MDRN	1	3	0.333
OKAS	2	3	0.667
TIRA	1	3	0.333
WICO	1	3	0.333
CSAP	2	5	0.400
ECII	2	5	0.400
ERAA	1	3	0.333
GLOB	1	3	0.333
MIDI	3	6	0.500
MPPA	2	6	0.333
RALS	2	4	0.500
RANC	1	3	0.333
SONA	2	6	0.333
TRIO	2	5	0.400
HOME	1	3	0.333
HOTL	1	2	0.500
ICON	1	3	0.333
INPP	2	4	0.500
JIHD	2	6	0.333
KPIG	1	3	0.333
PANR	1	3	0.333
PGLI	1	3	0.333

PJAA	2	4	0.500
PNSE	1	3	0.333
PSKT	2	4	0.500
SHID	2	5	0.400
BLTZ	1	2	0.500
EMTK	3	8	0.375
JTPE	1	2	0.500
MDIA	1	3	0.333
MNCN	2	5	0.400
MSKY	1	6	0.167
SCMA	2	4	0.500
ASGR	1	3	0.333
ABMM	1	3	0.333
BHIT	2	6	0.333
BMTR	2	6	0.333
BNBR	2	4	0.500
MYRX	2	4	0.500
POOL	1	2	0.500
SRTG	2	5	0.400
APEX	2	3	0.667
DYAN	2	5	0.400
GEMA	1	3	0.333

Lampiran 5: Hasil Analisis Statistik Deskriptif dengan Eviews 9

	ACMEET	COWN	INOWN	BCSIZE	IND
Mean	1.782347	0.547072	0.041064	1.392019	0.401772
Median	1.609438	0.524000	0.000600	1.386294	0.333000
Maximum	3.871201	0.992000	0.700000	3.091042	0.800000
Minimum	0.000000	0.176800	0.000000	0.693147	0.167000
Std. Dev.	0.626314	0.178610	0.111314	0.406322	0.101327
Skewness	1.034455	0.349143	4.004142	0.491756	1.180791
Kurtosis	4.221287	2.451713	19.99570	3.443956	4.154787
Jarque-Bera	54.83331	7.488114	3353.372	11.06173	65.65076
Probability	0.000000	0.023658	0.000000	0.003963	0.000000
Sum	406.3751	124.7325	9.362675	317.3803	91.60400
Sum Sq. Dev.	89.04516	7.241642	2.812724	37.47708	2.330666
Observations	228	228	228	228	228

Lampiran 6: Hasil Uji Normalitas dengan Eviews 9

Lampiran 7: Hasil Uji Multikolinearitas dengan Eviews 9

	COWN	INOWN	BCSIZE	IND
COWN	1.000000	-0.156039	-0.041488	0.101497
INOWN	-0.156039	1.000000	0.046863	-0.110669
BCSIZE	-0.041488	0.046863	1.000000	-0.108244
IND	0.101497	-0.110669	-0.108244	1.000000

Lampiran 8: Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Eviews 9

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.013175	Prob. F(14,213)	0.4412
Obs*R-squared	14.23537	Prob. Chi-Square(14)	0.4323
Scaled explained SS	20.35115	Prob. Chi-Square(14)	0.1195

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 11/03/16 Time: 03:45

Sample: 1 228

Included observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.333552	1.409894	-0.945853	0.3453
COWN^2	-2.549081	1.262205	-2.019546	0.0447
COWN*INOWN	-9.189608	3.662742	-2.508942	0.0129
COWN*BCSIZE	0.811395	0.664848	1.220422	0.2237
COWN*IND	1.751538	2.475480	0.707555	0.4800
COWN	1.482418	1.840558	0.805418	0.4215
INOWN^2	2.762192	2.309224	1.196156	0.2330
INOWN*BCSIZE	-0.234374	1.163323	-0.201469	0.8405
INOWN*IND	-9.277370	7.986356	-1.161652	0.2467
INOWN	6.836638	4.151950	1.646609	0.1011
BCSIZE^2	-0.110978	0.208582	-0.532059	0.5952
BCSIZE*IND	-1.164221	1.355045	-0.859175	0.3912
BCSIZE	0.470949	1.074174	0.438430	0.6615
IND^2	-4.273583	3.401916	-1.256228	0.2104
IND	4.250960	3.764311	1.129280	0.2601
R-squared	0.062436	Mean dependent var		0.373934
Adjusted R-squared	0.000812	S.D. dependent var		0.647895
S.E. of regression	0.647631	Akaike info criterion		2.032536
Sum squared resid	89.33784	Schwarz criterion		2.258150
Log likelihood	-216.7091	Hannan-Quinn criter.		2.123564
F-statistic	1.013175	Durbin-Watson stat		2.025742
Prob(F-statistic)	0.441215			

Lampiran 9: Hasil Pengujian Uji t dengan Eviews 9

Dependent Variable: ACMEET

Method: Least Squares

Date: 10/17/16 Time: 23:19

Sample: 1 228

Included observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.259554	0.262032	4.806869	0.0000
COWN	0.251991	0.233559	1.078918	0.2818
INOWN	0.065897	0.375184	0.175640	0.8607
BCSIZE	0.299790	0.101697	2.947885	0.0035
IND	-0.087322	0.411141	-0.212389	0.8320
R-squared	0.042543	Mean dependent var		1.782347
Adjusted R-squared	0.025369	S.D. dependent var		0.626314
S.E. of regression	0.618319	Akaike info criterion		1.898060
Sum squared resid	85.25689	Schwarz criterion		1.973265
Log likelihood	-211.3788	Hannan-Quinn criter.		1.928403
F-statistic	2.477171	Durbin-Watson stat		1.907056
Prob(F-statistic)	0.045079			

Lampiran 10: Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2 dan Uji F dengan Eviews 9

Dependent Variable: ACMEET

Method: Least Squares

Date: 10/17/16 Time: 23:19

Sample: 1 228

Included observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.259554	0.262032	4.806869	0.0000
COWN	0.251991	0.233559	1.078918	0.2818
INOWN	0.065897	0.375184	0.175640	0.8607
BCSIZE	0.299790	0.101697	2.947885	0.0035
IND	-0.087322	0.411141	-0.212389	0.8320
R-squared	0.042543	Mean dependent var		1.782347
Adjusted R-squared	0.025369	S.D. dependent var		0.626314
S.E. of regression	0.618319	Akaike info criterion		1.898060
Sum squared resid	85.25689	Schwarz criterion		1.973265
Log likelihood	-211.3788	Hannan-Quinn criter.		1.928403
F-statistic	2.477171	Durbin-Watson stat		1.907056
Prob(F-statistic)	0.045079			

Lampiran 11: Daftar Data Tidak Lengkap

Kode Perusahaan	ACMEET	COWN	INOWN	BCSIZE	IND		IND
					∑ Komisaris Independen	∑ Dewan Komisaris	
BISI	7	38.71%		3	1	3	0.333
AALI		79.68%		6	2	6	0.333
MAGP		50.00%		3	1	3	0.333
SGRO	4	67.00%		4	2	4	0.500
SSMS		24.46%		2	1	2	0.500
UNSP	4	73.38%		6	3	6	0.500
IIKP	4	48.43%		3	1	3	0.333
BRAU		84.74%	0.000%	4	2	4	0.500
BUMI	8	59.69%		7	4	7	0.571
DEWA	11	60.71%		5	2	5	0.400
DOID		60.34%	0.076%	6	4	6	0.667
GEMS	5	66.99%		6	3	6	0.500
MBAP	2	60.00%		4	1	4	0.250
PTBA	59	65.02%		6	2	6	0.333
PTRO	4	69.80%		4	1	4	0.250
BIPI	8	50.25%		4	2	4	0.500
ESSA	4	40.91%		4	2	4	0.500
ANTM	23	65.00%		6	2	6	0.333
CITA		73.15%	0.000%	3	1	3	0.333
CKRA	6	74.23%		2	1	2	0.500
INCO		58.73%		10	3	10	0.300
PSAB		92.60%		3	1	3	0.333
SMRU		51.03%		2	1	2	0.500
MITI		68.06%		5	2	5	0.400
SMCB	5	80.65%		6	3	6	0.500
IKAI		36.21%		2	1	2	0.500
BAJA		24.58%	73.930%	3	1	3	0.333
ISSP		55.94%		6	2	6	0.333
JKSW	6	30.56%	1.330%	2		2	0.000
PICO		76.20%	0.100%	3	1	3	0.333
TBMS	4	42.41%		5	2	5	0.400
BRPT		52.13%	1.600%	3	1	3	0.333
BUDI	4	44.04%		3	1	3	0.333
EKAD	5	75.45%		2	1	2	0.500
INCI		97.38%	13.880%	3		3	0.000
SOBI	5	97.96%		3	1	3	0.333
AKKU		77.19%	0.000%	2		2	0.000

IGAR	4	79.42%		3	1	3	0.333
IMPC		33.69%	1.580%	2	1	2	0.500
SIAP	5	82.10%		4	3	4	0.750
SIMA		73.46%		4	1	4	0.250
TALF	4	88.15%		3	1	3	0.333
JPFA	4	57.51%		3	1	3	0.333
MAIN	4	51.48%		5	3	5	0.600
TIRT		34.00%		3	1	3	0.333
DAJK		58.98%	1.010%	2	1	2	0.500
INKP	9	52.72%		9	4	9	0.444
KBRI	5	34.00%		3	1	3	0.333
KDSI		75.68%	4.810%	3	2	3	0.667
SPMA	5	44.60%		5	4	5	0.800
TKIM	9	60.00%		7	3	7	0.429
GDYR	4	85.00%		3	1	3	0.333
LPIN	3	55.73%		4	2	4	0.500
NIPS		31.09%	3.370%	3	1	3	0.333
ADMG	4	32.29%		5	2	5	0.400
ARGO		44.47%	2.470%	5	2	5	0.400
ESTI	4	59.10%		3	2	3	0.667
MYTX		58.77%	0.000%	4	2	4	0.500
PBRX	10	55.38%		3	1	3	0.333
POLY		51.65%		6	2	6	0.333
RICY	4	51.96%		3	1	3	0.333
STAR	5	54.42%		2	1	2	0.500
TRIS	9	40.24%		3	1	3	0.333
UNIT		45.21%		2	1	2	0.500
BIMA	8	52.50%		3	2	3	0.667
JECC	17	52.57%		3	2	3	0.667
KBLI	4	26.92%		5	2	5	0.400
VOKS		46.54%	0.204%	5	2	5	0.400
ALTO		53.53%	2.250%	3	1	3	0.333
CEKA		87.02%	0.058%	3	1	3	0.333
DLTA	1	58.33%		5	2	5	0.400
PSDN		46.93%	1.392%	6	2	6	0.333
HMSP	8	98.18%		6	3	6	0.500
DVLA		92.66%	0.000%	6	2	6	0.333
INAF	16	80.66%		3	1	3	0.333
KAEF		90.02%	0.015%	4	2	4	0.500
MERK		73.99%		3	1	3	0.333
PYFA		53.85%	11.540%	3	1	3	0.333
SCPI		98.32%		3	1	3	0.333

SIDO		40.50%	32.400%	3	1	3	0.333
SQBB		91.00%		3	1	3	0.333
TSPC		77.34%	0.810%	4	3	4	0.750
ADES	3	91.94%		3	1	3	0.333
MRAT	3	71.26%		3	1	3	0.333
CHITOSE	7	68.43%		2	1	2	0.500
ASRI	6	48.52%		5	2	5	0.400
BCIP	4	52.43%		3	1	3	0.333
BIPP		40.40%	0.000%	3	1	3	0.333
BKSL	12	52.37%		5	2	5	0.400
BSDE	5	26.45%		8	3	8	0.375
DUTI	5	88.56%		6	2	6	0.333
FMII	5	46.67%		3	1	3	0.333
GAMA	3	40.02%		2	1	2	0.500
GMTD	4	35.00%		8	3	8	0.375
GPRA	4	56.83%		3	1	3	0.333
JRPT		66.41%		5	2	5	0.400
KIJA	9	80.03%		4	2	4	0.500
LPKR	4	76.56%		9	6	9	0.667
MTSM		34.53%		4	2	4	0.500
NIRO	5	56.53%		3	1	3	0.333
OMRE		71.63%		6	2	6	0.333
PLIN	52	34.22%		3	1	3	0.333
SCBD		82.41%	0.000%	5	2	5	0.400
SMDM	4	71.52%		3	1	3	0.333
PTPP	12	51.00%		5	2	5	0.400
SSIA	8	73.56%		6	2	6	0.333
LAPD		30.25%	5.730%	2	1	2	0.500
CMPP	12	80.26%		2	1	2	0.500
BTEL	3	63.38%		6	3	6	0.500
BIRD	2	37.17%	41.810%	8	3	8	0.375
BLTA		39.94%	0.000%	4	1	4	0.250
BULL	4	32.86%		3	1	3	0.333
CASS	4	25.79%		5	2	5	0.400
HITS	8	45.52%		2	2	2	1.000
KARW		80.19%		3	1	3	0.333
MIRA	12	55.01%		5	2	5	0.400
LRNA	2	57.14%		3	1	3	0.333
PTIS		77.73%	0.048%	4	2	4	0.500
RIGS	4	80.54%		5	2	5	0.400
TAXI	4	51.00%		5	2	5	0.400

WEHA	6	52.54%		3	1	3	0.333
ZBRA	3	44.87%		2	1	2	0.500
IBST	8	42.57%		3	1	3	0.333
SUPR		53.50%	0.000%	5	2	5	0.400
TRUB		56.54%		2	1	2	0.500
CLPI		51.42%		3	1	3	0.333
CNKO		58.79%		3	1	3	0.333
EPMT	4	91.75%		4	2	4	0.500
ITTG	3	75.45%		2	1	2	0.500
JKON		60.89%	4.145%	5	2	5	0.400
KOBX	5	88.42%		3	1	3	0.333
LTLS		56.05%	2.620%	4	2	4	0.500
SDPC	4	55.00%		5	3	5	0.600
SQMI	4	80.00%		2	1	2	0.500
TGKA	4	37.31%		5	2	5	0.400
TMPI		84.47%		3	1	3	0.333
TRIL	4	77.35%		3	2	3	0.667
TURI	4	43.84%		5	2	5	0.400
WAPO	4	40.38%		2	1	2	0.500
ACES		59.97%	0.000%	4	2	4	0.500
AMRT		52.81%	0.000%	7	3	7	0.429
CENT		45.36%		3	1	3	0.333
GOLD		55.94%	13.990%	3	2	3	0.667
HERO	12	63.58%		9	3	9	0.333
KOIN	6	90.99%		6	2	6	0.333
LPPF	4	65.34%		5	2	5	0.400
MAPI	4	56.00%		5	2	5	0.400
RIMO		15.35%		2	1	2	0.500
SKYB	5	23.93%		2	1	2	0.500
TELE	4	38.75%		5	2	5	0.400
BAYU	4	32.30%		3	1	3	0.333
BUVA	4	47.33%		5	2	5	0.400
FAST	4	43.84%		6	2	6	0.333
GMCW	5	36.60%		7	4	7	0.571
JSPT		57.70%	0.600%	5	2	5	0.400
MAMI	5	42.41%		4	2	4	0.500
PDES	2	62.94%		3	1	3	0.333
PTSP		47.55%		3	1	3	0.333
ABBA	2	60.28%		6	2	6	0.333
FORU		92.75%		4	1	4	0.250
KBLV	4	55.10%		9	5	9	0.556
LINK	4	33.82%		5	2	5	0.400

LPLI	4	79.95%		3	1	3	0.333
TMPO	4	25.01%		5	2	5	0.400
VIVA	2	53.38%		6	2	6	0.333
MIKA	4	66.00%		4	2	4	0.500
SAME	4	84.53%		3	1	3	0.333
SILO	4	60.46%		7	3	7	0.429
SRAJ		53.79%	0.620%	6	3	6	0.500
DNET	4	39.64%		6	2	6	0.333
LMAS		54.62%	0.000%	2	1	2	0.500
MLPT	4	79.99%		7	3	7	0.429
BRMS	7	87.09%		3	1	3	0.333
MLPL	4	67.98%		6	2	6	0.333
PLAS	3	67.29%		2	1	2	0.500
ITMA	5	94.61%		3	1	3	0.333
MFMI	4	66.00%		3	1	3	0.333
SUGI		78.61%		3	1	3	0.333
CMNP	11	48.37%		7	3	7	0.429
JUMLAH DATA TIDAK LENGKAP	35	0	141	0	3	0	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hedyan Sabila Ghaisani, anak pertama dari tiga bersaudara ini lahir dari pasangan Nurmala dan Harjanto di Jakarta pada 17 Agustus 1994. Bertempat tinggal di Komplek Kemhan/Mabes TNI Jalan Bunga Matahari Blok: K-282, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Peneliti dapat dihubungi melalui e-mail hedyansabila@yahoo.com

Riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu SD Muhammadiyah 12 Pamulang lulus pada tahun 2006, SMP Negeri 49 Jakarta lulus pada tahun 2009, SMA Negeri 48 Jakarta lulus pada tahun 2012, dan Universitas Negeri Jakarta lulus pada tahun 2016.

Peneliti merupakan mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2012. Selama masa perkuliahan penulis aktif berorganisasi, dimulai dari Staff Biro Kesekretariatan dan Administrasi periode 2013 – 2014 dan menjadi Kepala Biro Kesekretariatan dan Administrasi periode 2014 – 2015. Penulis juga aktif mengikuti kepanitiaan dalam acara-acara yang diadakan oleh Jurusan Akuntansi dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penulis pernah menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Mitrasana, Pulo Gadung periode Juli-Agustus 2015.